

**TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM KERANGKA MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH DI MADRASAH TSANA WIYAH
(MTs) NEGERI 01 KABUPATEN KEPAHANG**

TESIS

Diajukan Sebagai persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)
Manajemen Pendidikan Islam



O L E H

**WANHAR
NIM. 17861018**

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2019**

**TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM KERANGKA
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI MADRASAH
TSANAWIYAH (MTs) NEGERI 01 KABUPATEN KEPAHIANG**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam*



OLEH

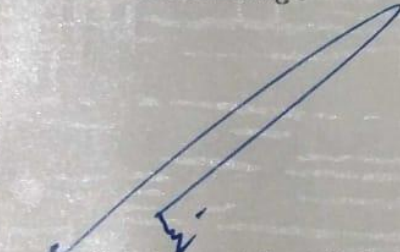
**WANHAR
NIM. 17861018**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2019 M/1440 H**

PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING TESIS

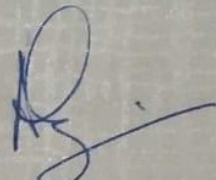
NAMA : Wanhar
NIM : 17861018
ANGKATAN : 2017/2018

Pembimbing I



Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I
NIP. 19590929 199203 1 001

Pembimbing II



Dr. Kusen, M.Pd.
NIP. 19690620 199803 1 002

Mengetahui
Penanggung Jawab Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam

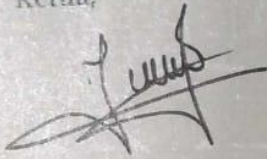


Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd
NIP. 19660925 199502 2 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
HASIL UJIAN TESIS**

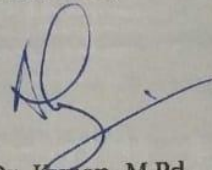
Tesis yang berjudul "Tinjauan Manajemen Keuangan Dalam Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 01 Kabupaten Kepahiang" yang ditulis oleh Sdr. Wanhar, NIM. 17861018 telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,



Dr. H. Jumira Warlizasusi, M.Pd.
NIP. 19660925 199502 2 001

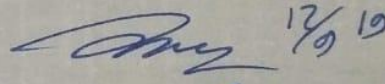
Sekretaris,



Dr. Kusen, M.Pd.
NIP. 19690620 199803 1 002

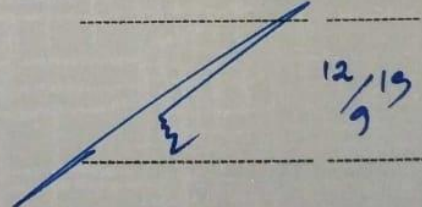
1. Penguji Utama

Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd.
NIP. 19650826 199903 1 001



2. Penguji

Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I.
NIP. 19590929 199203 1 001

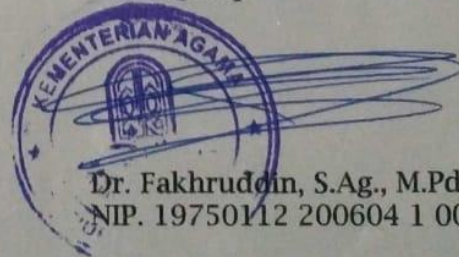


Rektor,
IAIN Curup



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711112 199903 1 004

Direktur Pascasarjana,
IAIN Curup



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19750112 200604 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wanhar
NIM : 17861018
Tempat dan Tanggal Lahir : Muara Lintang, 10 April 1976
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "Tinjauan Manajemen Keuangan Dalam Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang", benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 22 Agustus 2019
Saya Yang menyatakan.



Wanhar
NIM. 17861018

MOTTO

Jadikan pengalaman sebagai guru yang baik

(wanhar)

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan kepada :

1. Ayahanda yang tercinta H. Sopian Suri serta Ibunda tercinta Hj. Hamidah atas do'a, perhatian dan kasih sayang yang telah dicurahkan.
2. Ayahanda yang tercinta H. Sihanudin serta Ibunda tercinta Hj. Yusna (Mertua) yang selalu mendo'akan ananda.
3. Istriku tercinta Susilawati yang tela memberikan support dan motivasi, perhatian serta selalu mendo'akan sehingga saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini dengan baik.
4. Anak-anakku yang tersayang, yang senantiasa menjadi spirit dalam mencapai cita-citaku.
5. Segenap keluargaku yang senantiasa mendo'akan atas keberhasilanku.
6. Para Dosen Pasca Sarjana IAIN Curup yang selalu memberikan ilmu dan bimbingan sert pengarahan dalam setiap proses pendidikan selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi MPI IAIN Curup yang telah banyak memberikan support dan dukungannya didalam penyelesaian jenjang pendidikan ini.

ABSTRAK

WANHAR, NIM : 17861018. *“Tinjauan Manajemen Keuangan Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang”*. Tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, 2019.

Penelitian ini adalah untuk menggambarkan manajemen keuangan di Mts Negeri 1 Kepahiang: 1). Proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) di MTs Negeri 01 Kepahiang. 2). Pengelolaan yang dilakukan dalam penggunaan keuangan di MTs Negeri 01 Kepahiang. 3). Mekanisme pelaporan penggunaan keuangan di MTs Negeri 01 Kepahiang. 4). Pertanggungjawaban keuangan di MTs Negeri 01 Kepahiang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi manajemen Keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS). penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (Pengamatan), Dokumentasi, Interview. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1). penyusunan rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah (RAPBS) pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang di akhir tahun anggaran. Dalam pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang dilakukan dengan komite sekolah, dewan guru, dan orang tua. Hal ini bertujuan agar semua kebutuhan dapat terakomodir dengan baik dan untuk menjaga ketransparanan keuangan sekolah baik penerimaan maupun pengeluaran. 2). Sekolah adakalanya mengalami kekurangan dana. Untuk mengatasi hal ini pihak madrasah mengambil langkah yaitu mengajukan usul revisi anggaran. Di samping itu juga, mengadakan rapat dewan komite sekolah dan orang tua siswa untuk membahas perihal minusnya dana yang didapat oleh sekolah untuk mengatasinya. 3). Pada madrasah menganut asas pemisahan tugas. Keuangan dipegang oleh bendahara dan setiap pengeluaran keuangan madrasah diketahui oleh kepala sekolah, komite sekolah. Hal ini dilakukan untuk menjaga asas keterbukaan dan transparansi keuangan madrasah. 4). Pada sisi pertanggungjawaban keuangan madrasah, diberikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini disampaikan kepada pihak yang berwenang yaitu kementerian agama dan inspektorat jenderal secara rutin. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Manajemen Keuangan, MBS

KATA PENGANTAR


Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur Alhamdulillah, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik hidayah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tesis ini sebagai salah satu syarat akademik, untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup. Proses penulisan tesis tidak lepas masukan dan dorongan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu dalam bagian ini. Oleh karena itu secara khusus pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Wakil Rektor II dan Dosen Penguji Utama.
3. Dr. Kusen, S.Ag., M.Pd selaku Wakil Rektor III dan Dosen Pembimbing II.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
5. Bapak Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I., selaku Wakil Direktur dan Dosen Pembimbing I
6. Ibu Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Curup.
7. Semua Dosen program pascasarjana yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S2 ini.
8. Bapak Drs. H.Mulya Hudori, M.Pd., selaku Kepala kantor Kemenag Kab. Kepahiang
9. Bapak Romsy, S.Pd., MM., selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang yang memberikan waktu kepada penulis, untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan tesis ini.
10. Bapak Ibu guru MTs Negeri 03 Kepahiang yang telah memberikan bantuan dan supportnya hingga terselesaikannya tesis ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan support dan dukungannya didalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT selalu memberikan rahmatNya bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

Curup, 22 Agustus 2019


Wanhar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN	ii
BUKTI PENGESAHAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
B. Latar Belakang	1
C. Fokus Penelitian	11
D. Pertanyaan Penelitian	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Ruang Lingkup Penelitian	13
H. Definisi Konsep	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritik	16
B. Manajemen Berbasis Sekolah	48
C. Hasil Penelitian yang Relevan.....	51
D. Paradigma Penelitian	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	59
B. Subyek Penelitian	61
C. Teknik Pengumpulan data dan Pengembangan Instrumen Penelitian.....	61
D. Teknik Analisa Data	64
E. Pertanggung jawaban Penelitian	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Temuan Penelitian	67
B. Pembahasan Penelitian	86
C. Keterbatasan Penelitian	98
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Simpulan	100
B. Implikasi	102
C. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRN	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan dan peningkatan pembangunan disegala bidang termasuk di daerah, sehingga desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah tidak bisa ditawarkan lagi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Banyak aspek yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan ini diantaranya adalah sarana prasana, sumber daya pendidikan yang memadai serta pembiayaan pendidikan yang signifikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tersebut.

Berkaitan dengan pembiayaan dan keuangan yang menjadi salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Menurut Masditou dinyatakan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses mendapatkan dan mengatur pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa melalui sumber daya manusia lewat fungsi manajemen yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, untuk membiayai seluruh aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sehingga tercapainya mutu pendidikan mutu pendidikan yang diharapkan.¹

¹ Masditou. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang bermutu ". *Jurnal ANSIRU PAI Vol. 1 N o. 2, Juli - Des 2017, b. 119*

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang penting dan memiliki peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Setiap kegiatan perlu diatur agar berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien. Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan pengaturan yang baik. Keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan butuh uang. Keuangan juga perlu diatur sebaik-baiknya. Untuk itu perlu manajemen keuangan yang baik.

Manajemen keuangan yang baik dibutuhkan agar pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara maksimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya senada dengan tujuan dari manajemen berbasis sekolah yang memberikan keluasaan bagi masing-masing sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Sistem manajemen berbasis sekolah (MBS) memberikan otonomi, tanggung jawab, dan keluwesan yang lebih besar kepada sekolah untuk mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk

merencanakan (menyusun anggaran keuangan sekolah dan pengembangan RAPBS), melaksanakan dan mengevaluasi (memeriksa rencana pembiayaan untuk mengetahui anggaran yang sebenarnya) serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.²

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Di dalam manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian aktivitas terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

Salah satu unsur penting yang harus dimiliki suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan. Manajemen keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah.

² E, Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), h. 193-194

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien.

Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah: meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah; meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah; meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan jujur.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam

kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik akan menjadi kunci keberhasilan suatu program sekolah.

Untuk dapat mengelola keuangan dengan baik, dibutuhkan sumber daya yang berkompeten pada bidangnya. Namun demikian, sumber daya yang lain pun ikut mendorong pengelolaan keuangan yang baik, karena dalam pengelolaan sekolah mencakup berbagai segi baik dari staf tata laksana administrasi, staf teknis pendidikan didalamnya ada kepala sekolah dan guru, komite sekolah sebagai badan independent

yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang ditempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Oleh karena itulah, pengelolaan manajemen keuangan membutuhkan kesiapan sumber daya manusia. Secara kuantitas, kesiapan sumber daya manusia dapat dilihat dari kepala sekolah dan guru, ijazah, ruang/golongan yang dimiliki oleh kepala sekolah dan guru dan tenaga kependidikan selaku pelaku utama kebijakan.

Pada sisi lain, ketidaksiapan masyarakat dan orang tua wali murid lebih besar disebabkan karena masih rendahnya tingkat pendidikan, tidak adanya waktu dari masyarakat dan kurangnya informasi mengenai kebijakan manajemen berbasis sekolah (MBS).

Dari aspek sarana prasarana fisik sekolah dan lingkungan sekolah cukup kondusif untuk melaksanakan dan mengembangkan konsep atau kebijakan manajemen berbasis sekolah. Pada sisi pembiayaan yang bersumber baik dari pemerintah pusat yang diberikan dalam bentuk biaya rutin dan bantuan operasional sekolah (BOS) antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya tidak sama besar, tergantung dari jumlah murid.

Kedua sumber tersebut, pembiayaan yang dialokasikan, dan tertuang dalam RAPBS setiap tahunnya berada pada rentang antara Rp.900.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000.000, hal ini sangat menunjang pelaksanaan kebijakan manajemen berbasis sekolah. Namun demikian, persoalannya adalah bagaimana dalam pengelolaan biaya tersebut dalam mendukung program manajemen berbasis sekolah. Hal ini tentunya bersinggungan langsung antara kepala sekolah dan bendahara.

Berkaitan dengan keuangan dalam konsep manajemen berbasis sekolah dijelaskan bahwa dalam rangka manajemen berbasis sekolah yang memberikan kewenangan langsung kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana.

Kebutuhan dana untuk kegiatan operasional secara rutin dan pengembangan program pendidikan secara berkelanjutan sangat dirasakan setiap pengelola lembaga pendidikan. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan maka semakin banyak dana yang dibutuhkan. Konsep manajemen berbasis sekolah sangat mendukung bagi setiap pengelola pendidikan untuk memiliki kreativitas dalam menggali dana dari berbagai sumber akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan program pendidikan baik rutin maupun pengembangan di lembaga yang bersangkutan.

Menurut Mulyasa "keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah".³

Selanjutnya dapat pula disimak pendapat Danim bahwa penganggaran berbasis sekolah membuka peluang pada institusi untuk mengkreasikan anggaran, tidak hanya sebatas membelanjakan tetapi juga cara mendapatkannya".⁴

³ E, Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 48

⁴ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 142

Masalah pembiayaan pendidikan merupakan masalah yang cukup mendasar, hal tersebut nampak dengan masih terbatasnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Kenyataan ini ditambah dengan keterbatasan sumbangsih atau peran serta orang tua dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, serta pengelolaannya yang belum optimal.

Berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan maka akan membicarakan tentang bagaimana sekolah merencanakan, mengorganisasikan pembiayaan pendidikan di sekolah. Bagaimana sekolah menggali sumber-sumber pembiayaan pendidikan, dan pada pos-pos apa saja pembiayaan itu ditargetkan untuk mencapai tujuan sekolah. Kondisi ini tentunya menuntut sumberdaya yang profesional dalam bidang keuangan sekolah. Profesional tidak hanya terbatas mampu dalam menyimpan dan mengalokasikan saja, tetapi juga harus mampu merencanakan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), dan pelaporan.

Pemahaman tentang implementasi manajemen keuangan dalam manajemen berbasis sekolah mutlak diperlukan di setiap jenjang pendidikan, tidak terkecuali pada madrasah Tsanawiyah. Hal ini dikarenakan setiap madrasah mendapatkan bantuan operasional sekolah yang dapat digunakan untuk proses peningkatan mutu madrasah. Konsep ini menjelaskan bahwa pengelolaan pembiayaan yang profesional pun berlaku pada madrasah Tsanawiyah. Peran kepala sekolah dan bendahara menjadi sangat vital bagi proses pengelolaan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada madrasah Tsanawiyah.

Kemampuan dalam perencanaan, alokasi, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan pelaporan menjadi sangat penting dan

merupakan bagian dari tugas yang harus dijalankan oleh kepala sekolah dan bendahara secara profesional. Sehingga keterpenuhan akan kebutuhan sekolah dapat tercapai.

Sebagai lembaga pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan lembaga pendidikan yang lain. Berdasarkan pengamatan peneliti, di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kepahiang mempunyai keunggulan dalam bidang pengelolaan keuangan dan bidang ekstra kurikuler siswa.

Menurut Romsil selaku Kepala MTs Negeri 01 Kepahiang dalam bidang pengelolaan keuangan Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang pernah mendapat piagam penghargaan dari instansi KPPN Curup yang menaungi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang, dalam kurun waktu lima tahun ini (2016-2019) di posisi 10 besar dalam pengelolaan keuangan terbaik, pada tahun 2016 diurutan ke 6, pada tahun 2017 diurutan ke 4, pada tahun 2018 diurutan ke 7 dan pada tahun 2019 diurutan ke 6 pengelolaan keuangan terbaik.

Sedangkan dalam bidang kesiswaan siswa siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kepahiang menghasilkan siswa siswi berprestasi dalam pendidikan dan selalu menjadi perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dalam ajang Kompetisi Saint Madrasah (KSM) di propinsi Bengkulu setiap tahun dan juga pernah mengharumkan nama baik Madrasah dalam bidang kepramukaan yang menjadi unggulan serta di bidang olahraga seperti Futsal dan Atletik belum lagi prestasi yang lain.

Data ini menggambarkan tentang profesional sumberdaya pengelola keuangan yang sudah maksimal dalam mendukung program manajemen berbasis sekolah. Atas dasar pemikiran itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang manajemen keuangan

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri di Kabupaten Kepahiang yaitu MTs Negeri 01 Kepahiang.

Adapun judul penelitian yang diangkat adalah Tinjauan Manajemen Keuangan dalam Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 01 Kabupaten Kepahiang.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka difokuskan permasalahan dalam penelitian ini secara umum yaitu: bagaimana tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 01 Kabupaten Kepahiang?

C. Pertanyaan Penelitian

Berpedoman pada masalah umum di atas, maka dirumuskan masalah secara khusus yaitu:

1. Bagaimana tentang proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)?
2. Bagaimana tentang pengelolaan yang dilakukan dalam penggunaan keuangan sekolah?
3. Bagaimana tentang mekanisme pelaporan penggunaan keuangan sekolah?
4. Bagaimanakah tentang pertanggungjawaban keuangan sekolah?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 01 Kabupaten Kepahiang.

Adapun tujuan khususnya adalah untuk:

1. Mengetahui proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) keuangan sekolah dalam tinjauan manajemen berbasis sekolah.
2. Mengetahui bagaimana usaha yang dilakukan dalam penggunaan keuangan sekolah.
3. Mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan penggunaan keuangan sekolah.
4. Mengetahui tentang pertanggungjawaban keuangan sekolah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan tentang tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS).

2. Secara praktis

Penelitian ini akan berguna antara lain:

- a. Bagi pihak madrasah sebagai bahan masukan dalam tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS).
- b. Bagi Kementerian Agama, sebagai informasi tentang pelaksanaan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS), di Madrasah

Tsanawiyah (MTs) Negeri di Kabupaten Kepahiang untuk dapat dianalisa dan dilakukan peningkatan dalam pelaksanaannya

- c. Bagi peneliti, sebagai wahana berpikir intelektual dalam bidang pelaksanaan tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS). Sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
- d. Bagi peneliti lain, sebagai bahan kajian khazanah keilmuan dalam tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS).

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Manajemen Keuangan dalam Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Oleh karena itu, agar penelitian ini lebih terfokus maka peneliti membatasi masalah secara umum yaitu tentang pelaksanaan tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah yang memiliki ruang lingkup antara lain: proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), keuangan sekolah dalam manajemen berbasis sekolah (MBS), pengelolaan yang dilakukan dalam penggunaan keuangan, mekanisme pelaporan penggunaan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan.

G. Definisi Konsep

1. Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan (menyusun anggaran keuangan sekolah dan pengembangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah), melaksanakan dan mengevaluasi

(memeriksa rencana pembiayaan untuk mengetahui anggaran yang sebenarnya) serta mempertanggung-jawabkannya secara efektif dan transparan.⁵

2. Manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Oleh karena itu, manajemen keuangan, sarana dan prasarana suatu institusi berkaitan dengan hidup atau matinya sebuah lembaga, apapun jenis dan bidang aktivitasnya.⁶

3. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “school-based management”. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.⁷ Sedangkan menurut Agustinus Hermino Manajemen Berbasis Sekolah secara etimologi dapat dimaknai bahwa MBS dapat dipahami sebagai penyelarasan dan pengkoordinasian Sumber daya yang ada di sekolah untuk memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik agar dapat berkembang secara optimal.⁸

4. Pengelolaan Biaya Pendidikan

Pengelolaan biaya pendidikan merupakan aplikasi dari manajemen fungsi-fungsi keuangan terhadap pendidikan. Fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Jika ekonomi berfokus pada alokasi dan pembiayaan berfokus pada distribusi, maka, pengelolaan biaya berfokus pada fungsi-fungsi manajemen atau pelaksanaan.⁹

⁵ Hendarman, *Revolusi Kinerja Kepala Sekolah*, (Jakarta: PT. Indeks, 2015) h. 91

⁶ Ramayulis dan Mulyadi, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2017), h.107

⁷ E, Mulyasa, *Manajemen*, h. 24

⁸ Agustinus Hermino, *Manajemen Berbasis Sekolah di daerah 3T dan perbatasan di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 70

⁹ Fahrurrozi, *Manajemen Keuangan Madrasah*, Vol. XVII No. 2 2012/1433, (IAIN Walisongo), h.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Keuangan Sekolah

Keuangan sekolah, merupakan suatu simbol yang sangat menarik bagi seluruh warga sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah harus akuntabel, responsibel, dan transparan, karena itu pengelolaannya harus dengan sistem tertentu sehingga ketiga persyaratan tersebut dapat dipenuhi.¹⁰ Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan (PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan Pasal 1 ayat 4).¹¹

Biaya pendidikan dapat diartikan segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya, untuk mendapatkan pengembalian berupa barang atau layanan jasa dalam rangka pencapaian tujuan pada bidang pendidikan. Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses pelaksanaan pendidikan.¹²

Menurut Supriadi “biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan Instrumental (*instrumental input*) yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah).¹³ Sedangkan Hendarsjah menjelaskan secara sederhana, pengertian biaya pendidikan akan mengacu pada setiap pengeluaran untuk memperoleh berbagai sumber daya bagi penyelenggaraan suatu layanan pendidikan.¹⁴

Permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia adalah pemerataan, mutu,

¹⁰ Harsono. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), h. 92

¹¹ PP nomor 48 tahun 2008 tentang *pendanaan pendidikan* Pasal 1 ayat 4

¹² Harsono. *Pengelolaan*, h. 92

¹³ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah*, (Bandung : Rosdakarya, 2003), h.

¹⁴ Hidajat Hendarsjah, *Sudah Pantaskah Biaya Pendidikan Anak Anda? Cara Sederhana untuk Menalar Alokasi Pembiayaan di Bidang Pendidikan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 50

relevansi, efektivitas manajemen, dan manajemen pendidikan yang semuanya terkendala pada penggunaan anggaran/biaya yang dikeluarkan dan yang dilaksanakan setengah sentralistik dan setengah otonomi, dipandang kurang mendorong terjadinya demokratisasi pengelolaan pendidikan, terutama dalam kebutuhan pembiayaan pendidikan di daerah, sekolah, peserta didik dan pengelola pendidikan. Rendahnya biaya/anggaran pendidikan mempengaruhi profesionalitas guru, penyedia infrastruktur pendidikan, serta kemampuan daya saing SDM di tingkat global.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dengan kata lain sistem pendidikan menjadi desentralistik, sehingga sekolah dengan leluasa dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Mulyasa menjelaskan bahwa keleluasaan pengambilan keputusan di tingkat sekolah dimaksudkan agar sekolah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas program serta lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat yang ditunjang dengan sistem pengelolaan yang baik.¹⁵

Masalah keuangan sekolah juga dipengaruhi oleh masalah ekonomi dan politik yang sedang berkembang di masyarakat, demikian halnya masalah evaluasi keuangan sekolah tidak terlepas dari masalah politik. Agar keuangan sekolah dapat menunjang kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Untuk menjadi kepala sekolah yang profesional dituntut kemampuan mengelola keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan (pengelolaan keuangan), evaluasi dan pertanggungjawabannya. Disamping itu kepala sekolah juga harus memahami konteks politik dan ekonomi serta implikasinya terhadap keuangan sekolah.

¹⁵ Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 122-123

Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat terlepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu singkat. Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Uang yang dikeluarkan dibidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada tertentu, di masa yang akan datang harus dapat menghasilkan keuntungan (*benefit*) atau manfaat, baik dalam bentuk uang (*financial atau non financial*).

Mulyasa berpendapat bahwa masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah. Karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.¹⁶

Strategi sekolah dalam menggali dana pendidikan secara administratif sangat tepat karena berkaitan dengan bagaimana seorang kepala sekolah melakukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya dan sumber dana yang terdapat di lingkungan sekolah.

Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) strategi tersebut dapat direalisasikan melalui penyelenggara berbagai kegiatan berikut: melakukan analisis internal dan eksternal terhadap berbagai potensi sumber dana; mengidentifikasi mengelompokkan dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan; menetapkan sumber-sumber dana melalui musyawarah dengan orang tua siswa baru pada awal tahun ajaran, musyawarah dengan dewan guru untuk mengembangkan koperasi sekolah, menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah dan menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kesenian peserta didik untuk mengumpulkan dana dengan memanfaatkan fasilitas sekolah.¹⁷

¹⁶ E. Mulyasa, 2005. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. Ke-5, 2005), h. 193-194

¹⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 173

Kebutuhan dana untuk kegiatan operasional secara rutin dan pengembangan program pendidikan secara berkelanjutan sangat dirasakan setiap pengelola lembaga pendidikan. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan maka semakin banyak dana yang dibutuhkan. Untuk itu kreativitas setiap pengelola pendidikan dalam menggali dana dari berbagai sumber akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan program pendidikan baik rutin maupun pengembangan di lembaga yang bersangkutan.

Jamaris dalam Hendarman menjelaskan kreativitas merupakan suatu kecerdasan emosi yang berkaitan dengan keuletan, kesabaran dan ketabahan dalam rangka menghadapi ketidakpastian, dalam menghadapi berbagai masalah berkaitan dengan aktivitas yang menghasilkan kreativitas.¹⁸

1. Tujuan Manajemen Keuangan

Mulyasa menjelaskan bahwa:

Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan (mengelola keuangan), mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.¹⁹

Manajemen keuangan sekolah yang baik dan benar perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar-mengajar, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Hal ini penting, terutama dalam rangka manajemen berbasis sekolah, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah

¹⁸ Hendarman, *Revolusi Kinerja Kepala Sekolah*, (Jakarta: PT. Indeks, 2015) h. 91

¹⁹ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala*, h. 194

karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada permasalahan keterbatasan dana dan program yang harus dilakukan cukup banyak, sementara sumber daya yang dimiliki sangatlah terbatas.

Tujuan manajemen keuangan pendidikan dalam perspektif administrasi publik, adalah membantu pengelolaan sumber keuangan organisasi pendidikan serta menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat, bagi pengambilan keputusan keuangan yang dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang transparan, akuntabel dan efektif. Sedangkan tujuan manajemen keuangan sekolah adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah; meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah; meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka sangat dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta mememanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Manajemen keuangan pendidikan tidak hanya membahas mengenai sumber dana yang diperoleh dan digunakan untuk proses pendidikan. Namun, juga membahas mengenai berbagai persoalan (resiko) yang terkait dengan pengelolaan keuangan, serta berbagai upaya untuk mencari sumber-sumber pendanaan untuk kelangsungan organisasi.

Dalam pelaksanaannya manajemen keuangan ini menganut azas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggung jawaban.

Kepala sekolah dalam hal ini, sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan, disamping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

Kepala sekolah sebagai manajer keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah. Tugas manajer keuangan antara lain: manajemen untuk perencanaan perkiraan; manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya; manajemen kerjasama dengan pihak lain; penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Seorang manajer keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan berhubungan dengan masalah penggunaan keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah.

Penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, apakah itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat perlu didasarkan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan sebagai berikut: hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan; terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai bukti penggunaannya; sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan.

Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) merupakan implementasi prinsip-prinsip keuangan di atas pada pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah dan keserasian antara pendidikan dalam keluarga, dalam sekolah, sekolah dan dalam masyarakat, maka untuk sumber dana sekolah, sekolah itu tidak hanya diperoleh dari anggaran dan fasilitas dari pemerintah atau penyandang dana tetap saja, tetapi dari sumber dan dari ketiga komponen di atas.

Untuk itu di sekolah sebenarnya juga perlu dibentuk organisasi orang tua siswa yang implementasinya dilakukan dengan membentuk komite sekolah. Komite tersebut beranggotakan wakil wali siswa, tokoh masyarakat, pengelola, wakil pemerintah dan wakil ilmuwan/ulama di luar sekolah dan dapat juga memasukkan kalangan dunia usaha dan industri. Selanjutnya pihak sekolah bersama komite atau majelis sekolah pada setiap awal tahun anggaran perlu bersama-sama merumuskan RAPBS sebagai acuan bagi pengelola sekolah dalam melaksanakan manajemen keuangan yang baik. Pengendalian yang baik terhadap administrasi manajemen keuangan pendidikan akan memberikan pertanggung jawaban sosial yang baik kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

2. Fungsi Manajemen Keuangan

Agar tujuan lembaga pendidikan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan tercapai dengan efektif serta efisien maka perlu memfungsikan manajemen keuangan itu sendiri dengan baik. Berdasarkan catatan Depdiknas Dikdasmen, pengelolaan keuangan adalah kegiatan sekolah untuk merencanakan, menggunakan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan keuangan sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²⁰

Dengan kata lain fungsi manajemen keuangan terdiri dari perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, evaluasi dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan anggaran (keuangan) atau *implementation involves accounting* ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Hal terpenting adalah evaluasi sebagai proses penilaian pencapaian tujuan. Evaluasi sangatlah penting mengingat penggunaan sumber daya khususnya yang berbentuk uang yang tidak tepat dapat mengganggu proses kegiatan dan dapat merusak citra suatu organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas fungsi manajemen keuangan di lembaga pendidikan formal biasanya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: perencanaan keuangan; pelaksanaan

²⁰ Depdiknas, *Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Sekolah Dasar*, (Jakarta: Dikdasmen TK dan SD, 2001), h. 26

anggaran; evaluasi dan pertanggungjawaban.²¹

a. Perencanaan Keuangan

Secara umum proses manajemen keuangan sekolah meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen keuangan. Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa di dalam perencanaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai. Perencanaan sebagai proses, artinya suatu kejadian membutuhkan waktu, tidak dapat terjadi secara mendadak. Perencanaan sebagai kegiatan rasional, artinya melalui proses pemikiran yang didasarkan pada data yang riil dan analisis yang logis, yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak didasarkan pada ramalan yang intuitif.

Perencanaan sebagai kegiatan yang sistematis, berarti perencanaan meliputi tahap-tahap kegiatan. Kegiatan yang satu menjadi landasan tahapan berikutnya. Tahapan kegiatan tersebut dapat dijadikan panduan sehingga penyimpangan dapat segera diketahui dan diatasi. Sedangkan tujuan perencanaan itu sendiri arahnya agar kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang ditentukan. Yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan keuangan sekolah antara lain menganalisis program kegiatan dan prioritasnya, menganalisis dana yang ada dan yang mungkin bisa diadakan dari berbagai sumber pendapatan dan dari berbagai kegiatan.

Perencanaan yaitu tindakan yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang ditentukan dalam jangka ruang dan waktu tertentu. Dengan demikian, perencanaan itu merupakan suatu proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara mendetail dari suatu kegiatan/pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan

²¹ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala*, h. 198

ekonomis. Suatu perencanaan yang baik dan diharapkan mencapai hasil harus berisi berbagai kegiatan, mulai dari *forecasting, objectives, policies, programs, schedules, procedures*, dan *budget*.

Mulyasa menjelaskan bahwa perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau *budget*, sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan.²²

Perencanaan dalam manajemen keuangan adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan.²³ Dalam perencanaan manajemen keuangan meliputi mulai dari penerimaan sampai pelaporan yang tersusun secara tertib. Untuk itu dirancang anggaran dengan jalan menganalisa kebutuhan sesuai dengan data yang akurat.

b. Pelaksanaan Anggaran

Fattah mengemukakan pengorganisasian adalah sebagai proses membagi kerja kedalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi.²⁴

Organizing merupakan unsur kedua dari manajemen yang sangat penting. Setiap orang, baik manajer atau karyawan biasa merupakan bagian dari organisasi, karena itu, setiap orang yang termasuk di dalam organisasi berkewajiban untuk memenuhi tugas dan fungsinya karena ia adalah bagian dari organisasi secara keseluruhan. Seorang manajer atau pimpinan harus selalu mendorong orang-orangnya kearah perkembangan

²² E. Mulyasa, *Manajemen*, h 173

²³ EK. Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1986), h. 74

²⁴ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 71

organisasi yang positif, kreatif dan produktif.

Secara garis besarnya pelaksanaan keuangan dikelompokkan dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. *Pertama* Penerimaan. Setiap lembaga pendidikan pada umumnya melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari sumber-sumber dana perlu dibukukan sedangkan prosedur pengelolaannya selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan yang berlaku. *Kedua* Pengeluaran. Setiap penggunaan keuangan perlu melalui pengajuan keuangan secara tertulis dan sedapat mungkin hanya program-program yang termasuk dalam perencanaan keuangan saja yang didanai, agar mudah pengawasannya. Aturan pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya.²⁵

Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Pembukuan uang yang masuk dan keluar dilakukan secara cermat dan transparan. Untuk itu tenaga yang melakukan pembukuan dipersyaratkan menguasai teknis pembukuan yang benar sehingga hasilnya bisa tepat dan akurat.

Transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh bendaharawan sekolah senantiasa terjadi dari hari ke hari. Agar semuanya lancar maka setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan hendaknya dicatat dan dibukukan secara tertib sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Untuk itu salah satu tugas dari bendaharawan sekolah adalah mengadakan pembukuan keuangan sekolah.

Pembukuan setiap transaksi yang berpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran uang wajib dicatat oleh bendaharawan dalam buku kas. Pembukuan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar. Pembukuan yang tertib, akan mudah diketahui perbandingan antara keberadaan sumber daya fisik dan sumber daya manusia. Setiap saat pembukuan harus dapat menggambarkan mutasi yang paling akhir. Dari pembukuan yang baik, tertib,

²⁵ EK. Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan* , h. 200-201

teratur, lengkap, dan “*up to date*” akan dapat disajikan pelaporan yang baik, lengkap, dan bermanfaat. Pembuatan laporan dilakukan secara teratur dan periodik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Evaluasi dan Pertanggungjawaban

Dalam manajemen keuangan evaluasi dan pertanggungjawaban menjadi penting. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan.²⁶

Informasi hasil evaluasi dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan pada program. Apabila hasilnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, berarti program tersebut efektif. Jika sebaliknya, maka program tersebut dianggap tidak efektif (gagal). Melalui evaluasi akan dapat diketahui pula apa saja hambatan yang terjadi, dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Demikian pula, melalui evaluasi secara komprehensif akan dapat diketahui sejauhmana kemajuan atau hasil-hasil pendidikan dapat dicapai. Dalam implementasi manajemen keuangan evaluasi berkaitan dengan pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan pertanggungjawaban diartikan sebagai auditing, auditing merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedang apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak.²⁷

²⁶ Depdiknas. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Buku 3 Panduan Monitoring dan Evaluasi*, (Jakarta: Didasmen Direktorat SLTP Edisi 4, 2002), h. 2

²⁷ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala*, h. 204-205

Pertanggungjawaban keuangan berisi deskripsi penerimaan, penggunaan dan pengadministrasian keuangan, khususnya yang digunakan untuk program-program sekolah. Deskripsi hendaknya sampai pada analisis apakah dana digunakan secara efisien dan sesuai dengan pedoman administrasi keuangan yang berlaku.

3. Sumber-Sumber Biaya Pendidikan

Sudarwan Danim mengemukakan bahwa secara umum pembiayaan pendidikan dibedakan menjadi dua jenis yaitu biaya rutin (*recurring cost*) dan biaya modal (*capital cost*). Kedua jenis biaya ini dapat bersumber dari berbagai macam baik itu dari pemerintah, masyarakat atau pun usaha-usaha lain yang dilakukan oleh sekolah.²⁸

Sumber pembiayaan merupakan ketersediaan sejumlah uang atau barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang bagi penyelenggara pendidikan. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan (penerimaan): sumber dari Pemerintah Pusat dan Daerah berupa APBN dan APBD melalui DAU dan DAK, Dana BOS dan Block Grant. Sumber-sumber lain pendapatan dana pendidikan terdiri dari: *pertama*, sumber daya alam Eksplorasi/tambang emas, minyak, gas, batu bara, hasil hutan, hasil kelautan, dan lain-lain; hasil industry/perusahaan BUMN, BUMD, industry pariwisata, dan lain-lain; pajak bumi dan bangunan, kekayaan, penghasilan perorangan, pendapatan penjualan, kendaraan bermotor, dan lain-lain; *kedua*, sumber dari masyarakat. Sumber yang berasal dari masyarakat dapat berasal dari masyarakat peduli pendidikan, berupa sumbangan dari perorangan, lembaga, kelompok pengusaha, penyandang modal; orang tua peserta didik berupa SPP, iuran komite dan biaya pengembangan peserta didik secara pribadi.

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-

²⁸ Sudarwan Danim, . *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 145

duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; orang tua atau peserta didik; masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.²⁹

Nanang Fattah menjelaskan bahwa sumber dana pendidikan adalah pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima setiap tahun oleh lembaga sekolah dari lembaga sumber resmi dan diterima secara teratur. Adapun sumber penerimaan tersebut terdiri dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), orang tua murid (SPP), dan masyarakat.³⁰

Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat, namun dapat diperoleh dari bentuk kerjasama usaha atau wakaf. Namun pada dasarnya sekolah yang berdiri di bawah naungan yayasan memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukup dalam bagaimana mendapatkan sumber dana keuangan untuk mengoptimalkan kegiatan pendidikan di sekolah.

Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Adapun dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.

Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan, misalnya, biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau

²⁹ Tikky Suwantikno, (<http://tikkyuwantikno.wordpress.com/2009/08/20>)

³⁰ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.

rehab gedung, penambahan furniture, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, serta bebas dari penyakit yang bernama korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Efisiensi dan efektivitas pembiayaan pendidikan

Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas. Efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi karena tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relatif terhadap harganya. Dikaitkan dengan biaya, diungkapkan Hendarsjah bahwa efisiensi biaya lebih menekankan pada kondisi di mana *out put* dapat dihasilkan dengan besaran *input* yang seminim mungkin; dan hal ini mencerminkan adanya hubungan kuantitatif antara *input* dan *output*. Adapun efektivitas biaya lebih menekankan pada hubungan kuantitatif serta kualitatif antara *input* dan *output*-nya.³¹

Dalam dunia pendidikan, maka suatu pendidikan yang efisien dan efektif cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien dengan pengelolaan yang efektif. Program pendidikan yang efektif dan efisien adalah mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan tercapai tujuan yang tidak mengalami hambatan.

a. Efektivitas

Efektif adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Definisi efektivitas lebih dalam lagi, karena efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi. *Effectiveness* “characterized by

³¹ Hidajat Hendarsjah, *Sudah Pantaskah*, h. 113-114

qualitative outcomes”. Manajemen pembiayaan dikatakan memenuhi prinsip efektif apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur biaya aktivitas dalam rangka mencapai tujuan kualitatif outcomes sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab dapat membawa hasil.³²

Mulyasa mengemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Dengan demikian maka efektivitas adalah adanya keseimbangan antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.³³

Efektivitas biaya adalah kemampuan mencapai sasaran dan target sesuai dengan yang direncanakan. Efektivitas biaya suatu kegiatan yang menurut pasar yang berlaku dapat menyelesaikan program sesuai rencana. Prinsip-prinsip untuk menilai efektivitas adalah: menilai efektivitas yang berkaitan dengan problem tujuan dan alat untuk memproses *input* menjadi *output*. sistem yang dibandingkan harus sama/homogeny. Misal tingkat pendidikan, kecakapan, social ekonomi; mempertimbangkan semua *output*. Misal jumlah siswa lulus dan kualitas kelulusan; korelasi diharapkan bersifat kualitas, hubungan antara alat proses dan *output* harus berkualitas.

Analisis efektivitas biaya yang digunakan harus memperhatikan karakteristik situasi dan input yang terlibat dalam proses pendidikan. perbedaan karakteristik situasi dan input yang mempunyai implikasi pada biaya pendidikan yang diperlukan. Karena itu keputusan tentang efisiensi haruslah kontekstual dan proporsional.

³² Depdikbud, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 219

³³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis*, h. 82

b. Efisiensi

Efisiensi merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen sekolah karena sekolah umumnya dihadapkan pada masalah kelangkaan sumber dana, dan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Dharma dalam Mulyasa mengemukakan bahwa efisiensi mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi juga merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan masukan, biaya serta kesenangan yang dihasilkan.³⁴

Nanang Fattah menjelaskan efisiensi artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Dalam biaya pendidikan, efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat mengacu pencapaian prestasi siswa..³⁵

Sudarwan Danim “efisiensi di lingkungan persekolahan intinya adalah memposisikan pembuatan keputusan kepala sekolah mengenai bagaimana menjalankan institusi ke tingkat bawah, yaitu kepada orang-orang yang tahu apa hal terbaik yang harus dikerjakan. Guru tahu apa yang terbaik yang harus dikerjakan, demikian juga staf tata usaha, anggota komite sekolah dan sebagainya.”³⁶

Efisiensi adalah kemampuan menggunakan biaya dengan baik dan tepat. Pembiayaan dikatakan efisien manakala pencapaian sasaran atau target diperoleh dengan pengorbanan yang lebih kecil atau dengan biaya yang minimum. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. *Efficiency* “characterized by

³⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis*, h. 89

³⁵ Nanang Fatah, *Ekonomi*, h. 35

³⁶ Sudarwan Danim, *Visi Baru*, 140

kuantitatif out puts”. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan kuadran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya, perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal *pertama*, dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan ini dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan; *kedua*, dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan masyarakat secara memuaskan dengan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya.

Dalam pengelolaan Vincent P Costa memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya.³⁷

Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan

³⁷ Vincent P. Costa, *Panduan Pelatihan untuk Mengembangkan Sekolah*, (Jakarta: Depdiknas, 2000), h. 175

balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggarakannya manajemen operasional sekolah.

Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (*planning*) di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, *line of business*, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi: perencanaan anggaran; strategi mencari sumber dana sekolah; penggunaan keuangan sekolah; pengawasan dan evaluasi anggaran; pertanggungjawaban.

5. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)

a. Pengertian Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah

Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.³⁸

Dengan demikian, anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan sekolah. Maka seorang penanggung jawab program kegiatan di sekolah harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan.

³⁸ Nanang Fatah, *Ekonomi*, h. 47

Rencana anggaran pendapatan belanja sekolah merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) berisi tentang ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran.

Dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS), kepala sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus komite sekolah. Setelah tim dan Kepala Sekolah menyelesaikan tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah, Kepala Sekolah menyetujuinya. Pelibatan para guru dan pengurus komite sekolah ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru, kepala sekolah dan pengurus komite sekolah merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut.

Ada dua bagian pokok anggaran yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS), yaitu: *pertama*, rencana sumber atau target penerimaan/pendapatan dalam satu tahun yang bersangkutan, termasuk didalamnya keuangan bersumber dari: kontribusi orang tua siswa; sumbangan dari individu atau organisasi; sumbangan dari pemerintah; dari hasil usaha. *Kedua*, rencana penggunaan keuangan dalam satu tahun yang bersangkutan, semua penggunaan keuangan sekolah dalam satu tahun anggaran perlu direncanakan dengan baik agar kehidupan sekolah dapat berjalan dengan baik.³⁹

Dengan demikian, maka bagian terpenting dari anggaran yang mejadi fokus perhatian adalah dari mana sumber penerimaan atau pendapatan sekolah dalam satu tahun dan upaya menggunakan anggaran dana yang telah ada sesuai dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang telah dirancang.

³⁹ (<http://2009/8/20/manajemen-keuangan-sekolah.html>)

b. Langkah-langkah Penyusunan RAPBS

Dalam hubungan dengan penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan ekstern yang mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).⁴⁰ Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS, antara lain: penerimaan; penggunaan; pertanggungjawaban

Pertama, penerimaan. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dana dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. *Kedua*, penggunaan. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan RAPBS. *Ketiga*, pertanggung jawaban. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, setiap akhir tahun anggaran sekolah dituntut untuk dipertanggungjawabkan setiap dana yang dikeluarkan selama satu tahun. pertanggungjawaban ini dilakukan di dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti komponen sekolah, masyarakat dan pemerintah.⁴¹

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBS adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan anggaran berimbang tersebut maka kehidupan sekolah akan menjadi solid dan benar-benar kokoh dalam hal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada bendaharawan sekolah, dalam rangka untuk mempermudah pertanggung jawaban keuangan.

⁴⁰ Nanang Fatah, *Ekonomi*, h. 54

⁴¹ E. Mulyasa, *Manajemen*, h. 177-178

Penyusunannya hendaknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan; menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya; menentukan program kerja dan rincian program; menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program; menghitung dana yang dibutuhkan; menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.⁴²

Rencana tersebut setelah dibahas dengan pengurus dan komite sekolah, maka selanjutnya ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS). Pada setiap anggaran yang disusun perlu dijelaskan apakah rencana anggaran yang akan dilaksanakan merupakan hal baru atau kelanjutan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya dengan menyebut sumber dana sebelumnya.

Perencanaan keuangan sekolah memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran. Perencanaan keuangan sekolah dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber yang esensial, seperti: sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan yang luas tentang dinamika sosial masyarakat; tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan; menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan; tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan.⁴³

Dalam setiap anggaran yang disusun untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah, paling tidak harus memuat beberapa hal atau informasi sebagai berikut: informasi rencana kegiatan: sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggung jawab, rencana baru atau lanjutan; uraian kegiatan program, program kerja, rincian program; informasi kebutuhan: barang/jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan; data kebutuhan harga satuan, jumlah biaya yang dibutuhkan untuk seluruh volume kebutuhan; jumlah anggaran: jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, program, rencana

⁴² Depdiknas. *Manajemen Peningkatan*, h. 42

⁴³ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah*, h. 200

kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan; sumber dana: total sumber dana, masing-masing sumber dana yang mendukung pembiayaan program.

c. Realisasi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah

Lingkungan pendidikan dapat digolongkan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal sekolah mencakup tenaga kependidikan, saran dan prasarana, kelengkapan fasilitas dan biaya yang tersedia di setiap sekolah. Sedangkan lingkungan eksternal seperti keadaan sosial ekonomi orang tua siswa, aspirasi keluarga sangat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi-prestasi siswa.⁴⁴

Pemahaman akan lingkungan ini menjadi suatu pertimbangan dalam merealisasikan rencana anggaran. Oleh karena itu pada pengelolaan pendidikan, kemampuan kepala sekolah dalam manajemen sekolah dan manajemen keuangan menjadi sangat strategis dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Karena, dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang direalisasikan dapat terjadi tidak sama dengan rencana anggarannya, kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Ini dapat terjadi karena beberapa sebab: adanya efisiensi atau in-efisiensi pengeluaran; terjadinya penghematan atau pemborosan; pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan; adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi; penyusunan anggaran yang kurang tepat.

d. Pertanggung jawaban Keuangan Sekolah

Pertanggung jawaban merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada pihak-pihak tertentu. Harsono mengemukakan bahwa bagaimana pun kepala sekolah harus menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak yang memberikan biaya pendidikan yang dikelola oleh sekolah.⁴⁵

⁴⁴ Nanang Fatah, *Ekonomi dan pembiayaan*, h. 56

⁴⁵ Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan*, h. 96

Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah.

Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan adalah: pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS; laporan keuangan tersebut harus dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang ada; kwitansi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti pengeluaran lain; neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggung jawaban keuangan dari komite sekolah.⁴⁶

Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi.

e. Pengawasan Anggaran

Sagala menyebutkan secara umum pengawasan dikaitkan dengan upaya untuk mengendalikan, membina dan pelurusan sebagai upaya pengendalian mutu dalam arti luas.⁴⁷

Konsep pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi

⁴⁶ (<http://inducation.blogspot.com/2008/10>)

⁴⁷ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategi dalam peningkatan mutu pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2006), h. 59

dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia.⁴⁸

Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah. Terkait dengan pengawasan dari luar sekolah, kepala sekolah bertugas menggerakkan semua unsur yang terkait dengan materi pengawasan agar menyediakan data yang dibutuhkan oleh pengawas. Dalam hal ini kepala sekolah mengkoordinasikan semua kegiatan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berjalan lancar.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui: kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku; kesesuaian hasil yang dicapai baik di bidang teknis administratif maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan; kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara efisien dan efektif, dan; sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna.

Tujuan pengawasan keuangan ialah untuk menjaga dan mendorong agar: pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan; pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan; kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi atau setidak-tidaknya dapat dikurangi, dan; pelaksanaan tugas berjalan efisien, efektif dan tepat pada waktunya.

Sasaran pengawasan dapat dikelompokkan berdasarkan dimensi berikut ini; dimensi kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai; dimensi kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana; dimensi fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan

⁴⁸ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan*, h. 65

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula; dimensi efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

Pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu: pertama, berdasarkan subyeknya, meliputi: pengawasan intern, yaitu pengawasan terhadap semua unit dan bidang kegiatan yang ada di dalam organisasi; pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan dari luar organisasi yang mempunyai wewenang mengawasi. Kedua, berdasarkan waktunya, meliputi; pengawasan terus menerus, yaitu pengawasan yang tidak tergantung pada waktu tertentu, lebih merupakan kegiatan pengawasan rutin; pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu, berdasarkan rencana yang ditujukan terhadap masalah umum; pengawasan insidental, yaitu pengawasan yang dilaksanakan secara mendadak di luar rencana kerja rutin atau berdasarkan keperluan.

Pengawasan keuangan memiliki fungsi mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan. Walaupun perencanaan yang baik telah ada, yang telah diatur dan digerakkan, belum tentu tujuan dapat tercapai, sehingga masih perlu ada pengawasan. Pada dasarnya pengawasan merupakan usaha sadar untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan. Secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok yaitu memantau; menilai dan melaporkan hasil-hasil temuan, kegiatan atau monitoring dilakukan terhadap kinerja aktual baik dalam proses maupun hasilnya.⁴⁹

Pelaksanaan pengawasan anggaran pada dasarnya merupakan suatu aktivitas menilai, baik catatan dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran. Apakah pelaksanaannya telah tepat dan telah menduduki tempat yang tepat,

⁴⁹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan*, h. 66

apakah cara bekerjanya telah betul dan aktivitasnya telah berjalan sesuai dengan pola organisasi. Kalau terdapat kesalahan dan penyimpangan, maka segera diperbaiki. Oleh sebab itu setiap manajer pada setiap tingkatan organisasi berkewajiban melakukan pengawasan.

B. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 pasal 51, ayat (1) menjelaskan tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang didalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan sekolah.

2. Makna Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berbasis sekolah (School Based Management) adalah secara etimologi dapat dimaknai bahwa MBS dapat dipahami sebagai penyelarasan dan pengkoordinasian sumberdaya yang ada di sekolah untuk memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik agar dapat berkembang secara optimal.

Sedangkan secara terminologi MBS mempunyai pengertian yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang orang yang mendefinisikannya. Perbedaan definisi tersebut karena perbedaan perspektif para ahli dalam memandang MBS. Walaupun demikian, pada intinya MBS adalah terjadinya pergeseran kewenangan yang semula ditangan birokrasi pemerintah pusat/daerah kepada lingkungan sekolah. Dengan kata lain MBS merupakan bentuk desentralisasi dalam manajemen pendidikan dengan pelimpahan wewenang dan pengambilan kebijakan dari pemerintah pusat /daerah atau birokrasi kepada pengelola sekolah secara langsung dan melibatkan orang tua murid.

Dengan kata lain bahwa MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijaksanaanya sesuai dengan prioritas kebutuhan setempat.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah pengelolaan sekolah dimana kewenangan lebih luas diberikan kepada pengelolah sekolah secara otonom dan partisipatif untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

3. Tujuan Manajemen Berbasis sekolah

Tujuan pelaksanaan MBS adalah meningkatkan kualitas mutu pendidikan,efisiensi, mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan. Selain dari itu menurut Agustinus Hermino tujuan MBS untuk memandirikan sekolah atau memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang secara otonom kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam kerangka peningkatan kualitas pendidikan.⁵⁰

Dengan kewenangan yang besar bagi pengelola sekolah uttuk mengambil keputusan, maka proses peningkatan mutu pendidikan manjadi efektif dan efisien.

4. Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Setidaknya ada empat prinsip Manajemen Berbasis sekolah dalam mengelola sekolah, yaitu:

- a. Prinsip ekuifinalitas. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi, bahwa terdapat beberapa metode yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan.

⁵⁰ Agustinus Hermino, *Manajemen Berbasis Sekolah di daerah 3T dan perbatasan di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 76

- b. Prinsip desentralisasi. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pembelajaran dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan.
 - c. Prinsip penegelolaan mandiri. Manajemen Berbasis Sekolah menyadari pentingnya sekolah mendesain system pengelolaan secara mandiri dibawah kebijakannya sendiri.
 - d. Prinsip inisiatif manusia. Sejalan dengan perkembangan pergerakan hubungan antar manusia dan pergerakan ilmu prilaku pada manajemen modern, manusia mulai menaruh perhatian serius pada pengaruh penting faktor manusia pada efektifitas organisasi.
5. Faktor-Faktor Kesuksesan Implementasi MBS

Untuk mewujudkan keberhasilan manajemen Berbasis Sekolah, maka terdapat beberapa strategi pendidikan nasional: (a) demokrasi pendidikan, (b) meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, (c) meningkatkan relevansi pendidikan, (d) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa sekolah yang telah berhasil menarapkan MBS kan tercermin dari adanya kinerja sekolah yang kian membaik atau meningkat. Dampak dari peningkatannya kinerja sekolah adalah pengelolaan sekolah menjadi lebih efektif dan efisien.

C. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini terinspirasi dari pemikiran penelitian sebelumnya yaitu :

1. penelitian Budi, melakukan penelitian dengan judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar yang Efektif (Studi Multi Kasus Sekolah Dasar Panglima Sudirman, Sekolah Dasar Abdul Rahman, dan Sekolah Dasar Welirang di Kota Batu) menjelaskan

tentang pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui program BOS , sekolah sangat terbantu.⁵¹

2. Andrian, Arkanudin, Gusti Suryansyah Judul penelitian Implementasi Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Kab. Sintang. Hasil penelitiannya adalah Implementasi pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui keterlibatan Komite Sekolah di SMKN 1. Kabupaten Sintang belum terlaksana dengan maksimal. Kondisi ini terlihat dari belum sepenuhnya Komite Sekolah berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu sekolah.⁵²
3. Hasbi, judul penelitian, ” Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional di kota Palopo Tahun 2011-2012 metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pendekatan historis, sosiologis dan holistik integratif, metode: observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mutu pendidikan madrasah di Kota Palopo sudah memenuhi standar nasional pendidikan (2) implementasi peningkatan mutu pendidikan madrasah dan upaya mengatasi hambatannya MTsN dan MAN Palopo telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.⁵³
4. Sabar Budi Raharjo judul penelitian, ” Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, setiap satuan pendidikan memberi tanggapan yang positif dan layak untuk menerapkan standar nasional pendidikan. Kualitas lulusan dan persentase lulusan cenderung naik. Jumlah sekolah yang terakreditasi yang terbanyak adalah

⁵¹ Budi. *“Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar yang Efektif (Studi Multi Kasus Sekolah Dasar Panglima Sudirman, Sekolah Dasar Abdul Rahman, dan Sekolah Dasar Welirang di Kota Batu)”*. Disertasi, Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, 2011.

⁵² Andrian, Arkanudin, Gusti Suryansyah, ” Implementasi Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Kab Sintang”, *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*, 2013.

⁵³ Hasbi, ” Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional di kota Palopo Tahun 2011-2012 “, *Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3, Desember 2013*.

- nilai B. Variabel standar isi, ketenagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, penilaian, mempunyai hubungan yang positif.⁵⁴
5. Marus Suti judul penelitian “Strategi peningkatan mutu di era otonomi pendidikan” menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, penerapan aspek efisiensi internal, penerapan aspek eksternal pendidikan merealisasikan dan memperhatikan pendekatan dalam peningkatan mutu pendidikan.⁵⁵
 6. Ichsani Judul penelitian “Transparansi Manajemen Keuangan (Studi di Pondok Pesantren Salaf dan Modern Masyithoh di Desa Bolo, Wonosegoro, Boyolali Tahun Ajaran 2008/2009)”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan di pondok pesantren ini sudah transparan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang mengarah kepada perwujudan transparansi meliputi penyusunan anggaran, pembukuan keuangan, evaluasi keuangan dan pertanggungjawaban.⁵⁶
 7. Andre menyatakan bahwa tidak semua lembaga pendidikan yang mahal memiliki fasilitas pendidikan serba bagus menjadi jaminan bahwa lembaga tersebut baik. Tetapi lembaga pendidikan yang baik mempunyai manajemen pembiayaan pendidikan yang baik dan fasilitas pendidikan juga baik. Akan menjadi sesuatu yang paradoks ketika berbicara mutu tanpa didukung dana yang cukup. Mereka menyatakan bahwa kebutuhan program pendidikan dihitung berdasarkan teori ekonomi pendidikan yang rasional. Selama kondisi keuangan sekolah belum memadai sulit diharapkan terjadinya perubahan dalam mutu. Salah

⁵⁴ Sabar Budi Harjo” Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia” , *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Nomor 2, 2012.*

⁵⁵ Marus Suti,” *Strategi peningkatan mutu di era otonomi pendidikan* “, Jurnal Medtek, volume 3, Nomor 2, Oktober 2011. 21 Sri Suratno,” *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Studi Kasus di SD Islam Unggulan Bazra Sragen* “, Tesis, STAIN Surakarta, 2005.

⁵⁶ Ichsani,” *Transparansi Manajemen Keuangan, Studi di Pondok Pesantren Salaf dan Modern Masyithoh di Desa Bolo, Wonosegoro, Boyolali*”, Tesis, STAIN Surakarta, 2008.

satu komponen dalam MBS adalah siswa dan staf harus dijamin kesejahteraan dan disediakan kegiatan untuk pengembangan diri.⁵⁷

8. Ba'haqi, Nazir, Zahra. Manajemen Pembiayaan pendidikan pada SMKN di Kab. Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa pembiayaan.⁵⁸
9. Wagiran, "Peluang dan tantangan pembiayaan pendidikan menengah kejuruan dalam era otonomi daerah dan penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah " Penerapan otonomi daerah serta manajemen berbasis sekolah, belum berpengaruh banyak pada orientasi manajemen pembiayaan pendidikan. *Production Based Education* serta optimalisasi pengelolaan unit produksi yang dapat dikembangkan sekolah merupakan salah satu upaya untuk mendukung manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.⁵⁹
10. David Wijaya menemukan Sistem manajemen pembiayaan pendidikan merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah serta merupakan salah satu alat penentu terwujudnya mutu pendidikan. Pendidikan yang mahal bukan berarti secara otomatis dapat menunjukkan mutu pendidikan yang tinggi, karena tinggi rendahnya biaya pendidikan yang dikeluarkan ditentukan oleh manajemen pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah seharusnya menerapkan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis akuntansi yang sesuai

⁵⁷ Adre ,” Analisis Kebijakan Berbasis Sekolah”, *Jurnal Pendidikan jilid 14, Nomor 2, Juli 2005*.

⁵⁸ Ba'haqi, Nazir, Zahra, "Manajemen Pembiayaan pendidikan pada SMKN di Kab. Aceh Besar", *Jurnal Administrasi Pendidikan Program Pasca Sarjana Syiah Kuala, Volume 1, Nomor 1, 2012*.

⁵⁹ Wagiran, " Peluang dan tantangan pembiayaan pendidikan menengah kejuruan dalam era otonomi daerah dan penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Volume 15, Nomor 2, 2 Oktober 2006*.

dengan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku secara umum serta sistem manajemen pembiayaan pendidikan yang berbasis peningkatan mutu pendidikan.⁶⁰

11. Muhibbah (2008) dalam skripsi yang berjudul :” Aplikasi Manajemen Keuangan di Pondok Pesantren Madinnatunajah Jombang”, program Manajemen Pendidikan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan Manajemen keuangan di pondok pesantren madinatunnajah sudah baik berdasarkan fungsi manajemen yaitu bagaimana seorang manajer atau pimpinan pondok pesantren bisa merencanakan, mengorganisasikan, memberi pengawasan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan keuangan pondok pesantren kepada semua pihak yang ada dilingkungan pondok pesantren. Dari penelitian yang dilakukan oleh Muhibbah memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu meneliti mengenai implementasi manajemen keuangan, serta jenis sekolah yang diteliti adalah lingkup pondok pesantren. Perbedaannya ialah lokasi sekolah yang diteliti.⁶¹
12. Penelitian lain dilakukan oleh Esty Renaningtiyas (2013) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMPN 1 Madiun Esty Renaningtiyas SMPN 1 Madiun”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan MBS di SMPN 1. Dagangan banyak yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak sekolah. Pelaksanaan program dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi, penetapan visi dan misi analisa alternatif program, prioritas program,dan perumusan program kerja serta perumusan RAPBS. Dengan adanya sistem keterbukaan sekolah tidak berani main-main dalam pelaksanaan program MBS di waktu yang akan datang, kepala sekolah dalam melaksanakan program sangat bijak, trasparan, dan guru sangat mendukung proses pertanggungjawaban sekolah. Peningkatan mutu pendidikan terutama

⁶⁰ David Wijaya, “Implikasi Manajemen keuangan Sekolah terhadap kualitas pendidikan “, *Jurnal Pendidikan Penabur*, Nomor 13, Desember 2009.

⁶¹ Muhibbah, “Aplikasi Manajemen Keuangan di Pondok Pesantren Madinnatunajah Jombang”,2008.

tentang kelulusan, melalui program MBS ini berlandaskan asumsi bahwa sekolah akan meningkat mutu kelulusannya jika kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat diberi kewenangan yang cukup. Hal ini dapat dilihat dari hasil prestasi akademis/non akademik yang pernah diraih oleh anak didik.⁶² Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan manajemen keuangan. Perbedaannya pada lokasi sekolah yang diteliti.

13. Penelitian lain dilakukan oleh Dewi Arianti dalam skripsi yang berjudul “ Penerapan Manajemen Keuangan di Man Insan Cendekia Serpong”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan keuangan pada MAN Insan Cendekia Serpong sudah berjalan dengan baik dan sistematis. Hal ini dibuktikan dengan proses penerapan manajemen keuangan dilaksanakan sesuai dengan teori-teori yang berkaitan dengan proses pelaksanaan keuangan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan manajemen keuangan. Perbedaannya pada lokasi sekolah yang diteliti.⁶³

D. Paradigma Penelitian

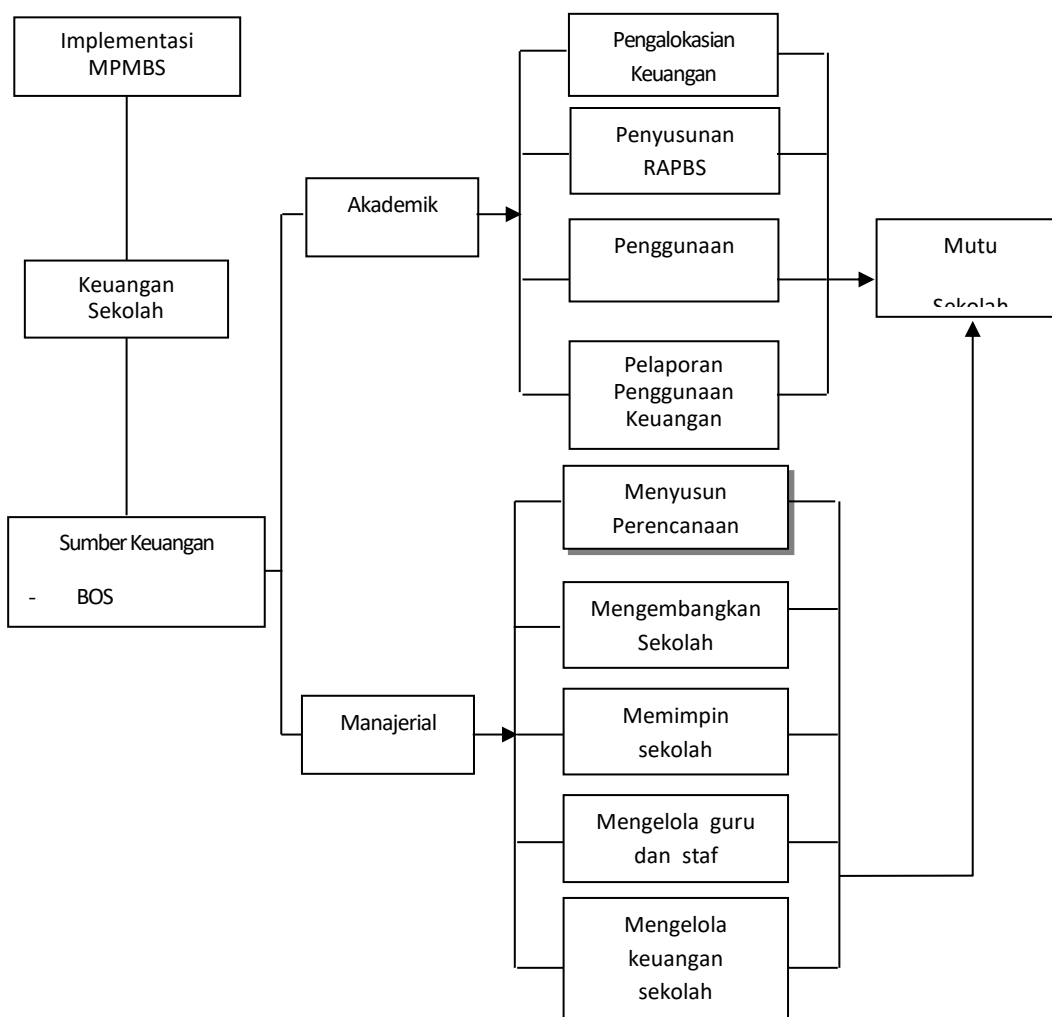
Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan kewenangan bagi sekolah dalam mengelola pendidikan. Demikian pula dengan permasalahan pengelolaan keuangan sekolah. Berbagai hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan sekolah baik secara akademik maupun manajerial agar dapat mencapai sekolah yang bermutu. Secara akademik pengelolaan keuangan mencakup pengalokasian keuangan dalam pemanfaatan biaya pendidikan yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendidikan. Penyusunan RAPBS dalam keuangan sekolah dengan mempertimbangkan penerimaan dan pengeluaran difokuskan pada alokasi penerimaan dan perkiraan kebutuhan biaya dalam waktu satu tahun. Penggunaan keuangan sesuai dengan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah akan menjadikan efektivitas penggunaan biaya yang

⁶² Esty Renaningtias , “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMPN 1 Madiun”. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 1, Nomor 1 Januari 2013, 14-17 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615 14.*

⁶³ Dewi Arianti, “*Penerapan Manajemen Keuangan di Man Insan Cendekia Serpong*”, 2014.

optimal. Di sisi lain, Pelaporan keuangan dalam pemanfaatan biaya pendidikan harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap penggunaan dana.

Dalam pengelolaan keuangan sekolah dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan sistem manajemen yang baik. Oleh karena itu, kemampuan manajerial kepala sekolah menjadi kuncinya, di antara kemampuan manajerial tersebut yaitu menyusun perencanaan, mengembangkan sekolah, memimpin sekolah, mengelola guru dan staf serta mengelola keuangan. Kedua fungsi ini apabila dijalankan dengan baik akan berefek positif bagi peningkatan mutu sekolah. Secara umum dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar.2.1

Paradigma Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengantarkan latar belakang penelitian agar memperoleh data yang valid, dan reliabel sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian. Rancangan penelitian ini mengacu kepada metode penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan secara jelas tentang pelaksanaan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 01 Kepahiang.

Arikunto dalam Sudijono menjelaskan bahwa penelitian komparasi pada pokoknya adalah mencari persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide, tentang kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau sumber prosedur kerja.⁶⁴

Dilihat dari segi pendekatan, maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Arikunto menjelaskan bahwa jenis pendekatan menurut pola-pola atau sifat penelitian non eksperimen. Sehubungan dengan pendekatan ini, maka dibedakan atas: penelitian kasus, penelitian kausal komparatif, penelitian korelasi, penelitian historis, penelitian filosofis. Tiga jenis penelitian yang pertama dinamakan juga penelitian deskriptif.⁶⁵

Penggunaan pendekatan deskriptif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang hendak dikumpulkan berkenaan dengan tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka

⁶⁴ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 274

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 73

manajemen berbasis sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kepahiang, termasuk juga mendeskripsikan secara lengkap faktor penunjang dan penghambat yang dihadapi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kepahiang dalam melaksanakan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS).

Penelitian ini tidak dimulai dengan suatu hipotesis yang hendak diuji kecocokannya rumusan sementara penelitian dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Tetapi penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data tentang permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan analisis statistik, hal ini dikarenakan data yang akan dikumpulkan bukanlah untuk mencari perbandingan dengan perhitungan angka tetapi untuk mendeskripsikan terhadap tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 01 Kabupaten Kepahiang yang didasarkan pada standar pengelolaan keuangan sekolah.

Suharsimi Arikunto menjelaskan dalam penelitian non hipotesis peneliti mengadakan komparasi status fenomena dengan standarnya. Oleh karena itu, sebelum memulai penelitian kancang, harus ditetapkan dahulu standarnya. Tentu saja penentuan standar ini harus dilakukan berdasarkan landasan yang kuat misalnya hukum, peraturan, hasil lokakarya dan sebagainya. Selanjutnya standar ini dijadikan kriteria sejauh mana fenomena mencapai standar.⁶⁶

B. Subyek Penelitian

Subyek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara. Sedangkan sumber sekundernya adalah guru-guru, komite sekolah dan tata usaha sekolah. Di samping itu, untuk memperdalam informasi dari sumber utama peneliti juga menggali informasi dari pihak-pihak lain yang secara langsung atau pun tidak langsung mengerti dengan permasalahan penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari masyarakat di lingkungan Madrasah

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, h. 199

Tsanawiyah (MTs) Negeri 01 Kepahiang atau pun masyarakat umum yang mengerti dengan pengelolaan keuangan sekolah.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh peneliti dalam rangka menjawab permasalahan penelitian dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi lapangan, wawancara secara mendalam dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : Observasi Non Sistematis : yang dilakukan oleh pengamat dengan baik dan tidak menggunakan instrumen pengamatan; Observasi Sistematis : yang dilakukan oleh pengamat dengan baik dan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.

Teknik observasi sangat penting digunakan karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lengkap, sesuai dengan keinginan yang dikehendaki dan berupaya menelaah tentang proses kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan. Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang hal-hal yang berkenaan dengan objek penelitian seperti kelengkapan administrasi keuangan dan rapat-rapat sekolah. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk selalu hadir di lokasi penelitian sekaligus untuk menjalin hubungan dengan pihak sekolah.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada sampel penelitian dengan berhadapan langsung. Menurut Farida Nugrahani “wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama yang sangat

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan mendalam”.⁶⁷

Dalam pelaksanaannya wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara mengorientasikan kepada perolehan data dan keterangan dari individu tertentu untuk keperluan informasi, perolehan sikap dan pendapat, serta pemahaman mereka tentang tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Teknik ini digunakan untuk mencari informasi tentang penyusunan RAPBS, usaha penggunaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah

c. Dokumentasi

Menurut Surachmad dokumentasi adalah “laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau merumuskan keterangan-keterangan mengenai peristiwa tersebut”.⁶⁸

Adapun teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang dokumen pengalokasian keuangan dan mekanisme pelaporan, dokumen pembukuan keuangan dan dokumen RAPBS. Di samping itu digunakan untuk mengetahui keadaan siswa dan keadaan lembaga tempat penulis mengadakan penelitian.

2. Pengembangan Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, selanjutnya dilengkapi dengan penggunaan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Masing-masing instrumen penelitian di atas digunakan untuk memperoleh data mengenai

⁶⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), h.124

⁶⁸ Winarno Surachmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: Tarsito, 1995), h. 91

masalah penelitian ini adalah tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS) di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 01 Kepahiang.

D. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data dilakukan secara induktif deskriptif, yaitu cara penyusunan data dengan cara menggambarkan yang diperoleh dari data yang bersifat khusus ke umum. Dalam penelitian deskriptif teknik analisa data secara sederhana dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: pertama pengumpulan data, yaitu pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh catatan lapangan yang telah dibuat berdasarkan wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan. Kedua reduksi dan kategorisasi data, yaitu pada tahap ini dilakukan proses penyederhanaan dan pengkategorian data. Ketiga display data, merupakan proses menampilkan data hasil reduksi dan kategorisasi dalam matriks berdasarkan kriteria tertentu. Keempat penarikan kesimpulan, yaitu apabila hasil display data menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, dimulailah penarikan kesimpulan menggunakan teori dan hasil data di lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 01 Kepahiang.

E. Pertanggung Jawaban Penelitian

1. Keabsahan data

Suatu penelitian dapat dikatakan valid apabila data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Teknik yang diterapkan dalam memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data serta triangulasi waktu (memperpanjang waktu penelitian dan pengamatan secara kontinyu serta mendiskusikan hasil data yang diperoleh dengan orang

lain). Tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa apa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kredibilitas digunakan untuk memenuhi kriteria bahwa data dan informasi yang dikumpulkan peneliti harus mengandung nilai kebenaran.

2. Orisinilitas Penelitian

Guna menjaga keorisinilan penelitian, maka proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian akan peneliti lakukan sendiri. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan akan meminta bantuan pihak lain dalam hal pengeditan dan penulisan dari penelitian guna memperlancar pekerjaan penulisan.

3. Kejujuran, Keterpercayaan, dan Kebenaran Proses dan Hasil Penelitian

Peneliti akan berusaha menggambarkan data yang diperoleh secara ilmiah tanpa ada manipulasi data. Penafsiran dan pembahasan didasarkan pada fakta dan data di lapangan, tidak hanya sekedar interpretasi diri peneliti. Data yang diperoleh akan dikaji untuk membandingkan pelaksanaan tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 01 Kabupaten Kepahiang.

4. Kaidah Karya Tulis

Kaidah penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

5. Kemandirian Peneliti

Penelitian bersifat mandiri, karena murni kegiatan ilmiah dalam rangka penulisan tesis guna memperoleh gelar Magister Manajemen Pendidikan serta bebas dari kepentingan

non-akademis. Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ini merupakan beban peneliti, sehingga penelitian ini diharapkan akan lebih independen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pencapaian standar pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang didapat data sebagai berikut:

1. Proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)

Salah satu implikasi dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah pengelolaan sekolah dimana kewenangan lebih luas diberikan kepada pengelola sekolah secara otonom dan partisipatif untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

sebagaimana juga telah diamanatkan dalam perundang-undangan sistem pendidikan adalah diharuskannya pimpinan sekolah (terutama Kepala Sekolah) untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pengembangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Oleh karena itu disarankan agar pimpinan itu menyadari berbagai masalah yang harus mereka hadapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar itu. Berikut ini diuraikan beberapa masalah yang sering muncul dalam proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menganalisis alternatif pencapaian tujuan, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus diupayakan agar pendapatan tidak minus.

Dari temuan di lapangan diketahui bahwa dalam proses merencanakan anggaran pihak sekolah mengidentifikasi terlebih dahulu tujuan penyusunan. Hal ini dilakukan agar mendapat skala prioritas dan agar tujuan dari rencana penyusunan anggaran dapat tercapai. Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang mengenai “Apakah dan mengapa proses mengidentifikasi tujuan penyusunan anggaran? Jawaban yang diberikan yaitu:

Pihak sekolah sebelum menyusun rencana penggunaan keuangan terlebih dahulu kita mengidentifikasi tujuan penyusunan terlebih dahulu. Karena tanpa identifikasi rencana penyusunan maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Identifikasi penyusunan tujuan ini kita lakukan pada akhir tahun anggaran bersama kepala sekolah dan Kepala tata usaha beserta staf.⁶⁹

Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) pada konsepnya dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan data yang didapat, diketahui bahwa proses penyusunan anggaran dilakukan oleh kepala sekolah bersama dewan guru, tata usaha, bendahara dan komite sekolah didahului dengan terlebih dahulu menyusun identifikasi kebutuhan.

Dari hasil dokumentasi dan pengamatan yang penulis lakukan di madrasah diketahui bahwa dalam pembahasan penyusunan RAPBS pihak sekolah mengundang komite sekolah untuk menghadiri pembahasan tentang RAPBS yang dihadiri oleh para guru, bendahara dan tata usaha.

Dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus komite sekolah. Setelah tim dan Kepala Sekolah menyelesaikan tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah, kepala sekolah menyetujuinya. Pelibatan para guru dan pengurus komite sekolah ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru, kepala sekolah dan pengurus komite

⁶⁹ Romsy, Kepala MTsN 1 Kepahiang, tanggal 7 Februari 2019

sekolah merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut.

Hasil wawancara dengan dewan guru MTs Negeri 01 Kepahiang selaku wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan tentang bagaimana keikutsertaan Guru dalam penyusunan RAPBS? Jawaban yang diberikan yaitu :

Ya, dalam penyusunan RAPBS kami diajak dan diikutsertakan dalam pelaksanaan tersebut dimana pelaksanaan rapat dilakukan pada akhir tahun dan sebelumnya kami menginventarisir kebutuhan yang menjadi prioritas terutama dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.⁷⁰

Dari pernyataan selanjutnya diungkapkan bahwa : Banyak kegiatan yang lain dapat kami usulkan seperti kegiatan ekstra kurikuler demi menunjang prestasi anak.

Dari hasil wawancara dengan guru MTs Negeri 01 Kepahiang menyatakan bahwa :

Dalam penyusunan RAPBS Komite Sekolah dikutsertakan dan diundang dalam pelaksanaan tersebut dimana sebelum pelaksanaan rapat dilakukan pada akhir tahun pengurus Komite Sekolah selalu dilibatkan untuk menginventarisir kebutuhan yang menjadi prioritas terutama dalam kebutuhan sekolah serta skala prioritas yang dibutuhkan oleh pihak sekolah.⁷¹

Hasil observasi yang dilakukan di madrasah diketahui bahwa dalam penyusunan RAPBS kepala sekolah melibatkan semua komponen terutama warga sekolah seperti komite sekolah, guru dan bendahara. Hal ini dilakukan oleh kepala sekolah sebagai upaya pemberdayaan stakeholder sekolah dan untuk mendapatkan rencana yang sesuai dengan tujuan.

Dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) pihak sekolah baik Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang melaksanakannya sesuai

⁷⁰ Ali Hanafiah Wakil Kepala sekolah MTs Negeri kepahiang, tanggal 18 Februari 2019

⁷¹ Ali Guru MTs Negeri 1 Kepahiang, tanggal 20 Februari 2019

dengan langkah-langkah penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah yaitu: inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pengembangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, analisis kebutuhan tahun berikutnya, dan masukan dari seluruh warga sekolah maupun komite sekolah; inventarisasi sumber pembiayaan baik dari rutin maupun pengembangan; penyusunan rencana kegiatan sekolah (RKS) yang lengkap. Kepala Sekolah membuat tabel rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang terdiri dari kolom-kolom, yaitu kolom rencana penerimaan dan jumlahnya, kolom rencana pengeluaran dan jumlahnya. Tabel tersebut diisi kemudian ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.

Pada tahap selanjutnya diungkapkan oleh kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang yaitu tentang proses program sekolah dalam upaya pengembangan sekolah dengan skala prioritas yang telah ditentukan yaitu pada kegiatan belajar mengajar. Pada tahap perencanaan, analisis kebutuhan pengembangan sekolah dalam kurun waktu tertentu menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan. Kebutuhan dalam satu tahun anggaran, lima tahun, sepuluh tahun, bahkan dua puluh lima tahunan. Perencanaan dibuat oleh kepala sekolah, guru, staf sekolah dan pengurus komite sekolah. Mereka mengadakan pertemuan untuk menentukan kebutuhan dan menentukan kegiatan sekolah dalam kurun waktu tertentu.

Hasil wawancara tentang inventarisir kebutuhan, diungkapkan oleh kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang yaitu: Semua kebutuhan yang kita perlukan perlu kita inventaris terlebih dahulu. Hal ini sangat penting dalam membantu kita menyusun rencana kegiatan sekolah untuk tahun yang akan dijalani yang dituangkan dalam bentuk program kerja sekolah. di samping itu juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi program yang kita lakukan pada tahun yang lewat. Proses inventarisir ini tentunya di sekolah pada akhir tahun ajaran.⁷²

⁷² Romsy, Kepala MTsN 1 Kepahiang, tanggal 7 Februari 2019

Dengan demikian, inventarisir kegiatan dalam suatu perencanaan sangat dibutuhkan. Berdasarkan analisis ini diperoleh banyak kegiatan yang perlu dilakukan sekolah dalam satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun, atau bahkan dua puluh lima tahun. Untuk itu perlu diurutkan tingkat kebutuhan kegiatan dari yang paling penting sampai kegiatan pendukung yang mungkin dapat ditunda pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan tersedianya waktu, keberadaan tenaga dan jumlah dana yang tersedia atau yang bisa diupayakan ketersediaannya.

Dalam masalah program kerja, ketika dilakukan wawancara dengan kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang tentang apakah pihak sekolah menentukan program kerja? Mengapa dan siapa dan bagaimana proses pembuatan program kerja itu dilakukan?. Didapat jawaban: Ya. sekolah menentukan program kerja agar rencana anggaran dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan program ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara melakukan musyawarah kerja dengan staf (guru dan tata usaha).⁷³

Hasil observasi yang dilakukan pada madrasah ditemukan program kerja yang dimiliki oleh madrasah yang harus dijalankan oleh setiap warga sekolah untuk mencapai tujuan kegiatan pendidikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Program kerja tersebut dibuat oleh madrasah dengan jangka waktu satu tahun.

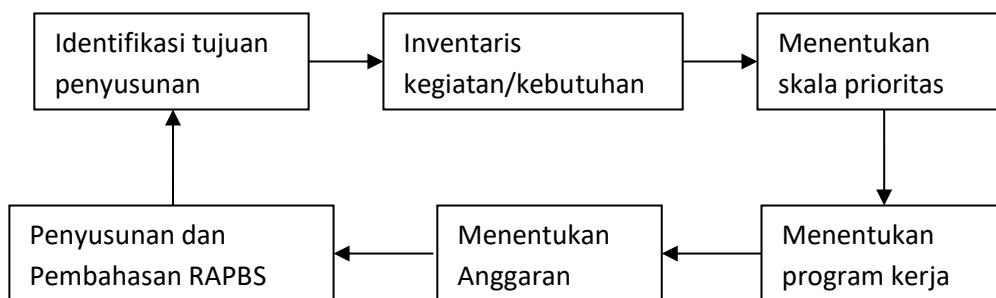
Pada aspek penyusunan dan pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Peneliti melakukan wawancara kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang tentang apakah RAPBS dibahas bersama guru dan komite sekolah? kapan dan dimana penyusunan RAPBS dilakukan. Didapat jawaban yaitu:

Ya. RAPBS dilakukan oleh kepala sekolah bersama guru dengan mengundang komite sekolah. RAPBS ini kita susun di sekolah yang dilakukan pada awal tahun anggaran.

⁷³ Romsy, Kepala MTsN 1 Kepahiang, tanggal 7 Februari 2019

RAPBS yang dibuat juga untuk satu tahun yaitu pada bulan januari hingga desember. Adapun tujuannya yaitu agar terjadi ketransparanan anggaran.⁷⁴

Hasil penelitian yang dilakukan di sekolah tersebut tentang alur proses penyusunan RAPBS dapat diskemakan sebagai berikut:



Gambar.4,1

Skema Proses Penyusunan RAPBS

2. Pengelolaan yang dilakukan dalam penggunaan keuangan

Merealisasikan rencana yang telah dibuat dan disepakati merupakan kegiatan penggunaan dana sesuai dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang telah disusun. Hasil wawancara dengan kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kepahiang tentang usaha penggunaan anggaran yaitu: Penggunaan anggaran kegiatan madrasah mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian didapat informasi bahwa penggunaan anggaran yang dilakukan oleh sekolah sesuai dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Hal ini berarti penggunaan anggaran tersebut mengarah pada usaha peningkatan mutu sekolah. Dalam

⁷⁴ Romsy, Kepala MTsN 1 Kepahiang, tanggal 7 Februari 2019

pengeluaran keuangan sekolah yaitu pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang keuangan dikeluarkan oleh pihak bendahara madrasah.

Menurut kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang : Pengeluaran anggaran pembiayaan/dana dilakukan oleh bendahara atas permintaan kepala sekolah tentunya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan yang tercantum dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran.⁷⁵

Dari hasil dokumentasi dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa semua keuangan sekolah dipegang oleh bendahara sekolah. Dana tersebut disimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal ini tentunya dapat dibuktikan dengan adanya buku Bank atas nama rekening sekolah. Dana tersebut apabila diperlukan oleh sekolah maka bendahara mengambilnya ke Bank.

Sedangkan dalam mengatasi kekurangan anggaran sekolah mengajukan kembali anggaran kepada kementerian agama yang dilakukan oleh kepala sekolah. Namun apabila anggaran tersebut berlebih, maka keuangan tersebut dikembalikan ke kas negara. Dari hasil wawancara penulis kepada kepala madrasah tentang usaha sekolah dalam mengatasi kekurangan dana anggaran dan juga kebijakan yang diambil apabila dana berlebih yaitu:

Menurut kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang : Kalau dalam pelaksanaannya kita mengalami kekurangan dana, maka dari kepala sekolah mengajukan revisi anggaran (untuk dana rutin) terus disesuaikan dengan dana yang ada (Dana BOS). Pengajuan tersebut dilakukan oleh kepala sekolah ke Kementerian Agama Provinsi. Begitupun kalau dana kita peroleh berlebih maka akan dikembalikan oleh bendahara ke kas negara.⁷⁶

Penggunaan anggaran sekolah haruslah sesuai dengan peraturan atau prosedur yang ada/berlaku. Pada aspek ini madrasah telah melaksanakannya, hal ini bertujuan agar tidak

⁷⁵ Romsy, Kepala MTsN 1 Kepahiang, tanggal 7 Februari 2019

⁷⁶ Romsy, Kepala MTsN 1 Kepahiang, tanggal 7 Februari 2019

adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, biaya yang didapat harus dipegang oleh bendahara sekolah.

Hasil wawancara tentang apakah penggunaan dana tetap memperhatikan perangkat peraturan yang ada dan selaras dengan rincian pengeluaran? mengapa dan siapa yang perlu memperhatikan perangkat peraturan yang ada dan selaras dengan rincian pengeluaran?

Diungkapkan oleh dengan kepala Madrasah Tsanawiyah 01 Kepahiang : Ya. penggunaan dana harus memperhatikan perangkat peraturan yang ada dan selaras dengan rincian pengeluaran. Bendahara selaku pengelola keuangan harus memperhatikan hal ini agar supaya tidak terjadi penyimpangan anggaran sekolah.⁷⁷

Adapun mengenai pemegang dana sekolah, dari hasil wawancara kepada bendahara tentang pemegang keuangan sekolah : diungkapkan oleh bendahara Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang bahwa: di sekolah kita semua keuangan dikendalikan oleh bendahara baik uang masuk maupun uang keluar. Uang yang dipegang tersebut dimasukkan ke dalam rekening sekolah, dan dikeluarkan apabila ada perintah kepala sekolah.

Bendahara akan mengeluarkan dana tersebut apabila kepala sekolah mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Pada proses penerimaan dan pengeluaran anggaran yaitu melalui KPPN dan dikeluarkan sesuai dengan perintah atasan. Sedangkan pada aspek penerimaan dan pemanfaatan dana operasional sekolah (BOS) diketahui oleh komite sekolah agar diketahui ke mana dan untuk apa dana tersebut digunakan.

⁷⁷ Romsy, Kepala MTsN 1 Kepahiang, tanggal 7 Februari 2019

Hasil wawancara dengan kepala sekolah tentang apakah pemanfaatan dana BOS dibicarakan dengan komite sekolah? dan mengapa dan apa fungsi komite sekolah dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS)?.

Ungkapkan oleh kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang yaitu: Dalam hal dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang kita terima kita bicarakan dengan komite sekolah, begitupun dengan orang tua siswa. ini kita lakukan agar komite tahu ke mana dan untuk apa dana digunakan. Sehingga komite dapat memantau kegiatan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) ini.⁷⁸

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Guru MTs Negeri 01 Kepahiang Tentang bagaimana pengelolaan keuangan di sekolah MTs Negeri 01 Kepahiang yaitu: Kami melihat bahwa pengelolaan keuangan yang ada di sekolah sudah cukup baik dan transparan dalam pelaksanaannya baik dari segi penggunaannya maupun laporan keuangan yang mana pengurus komite sekolah diberi laporan penggunaan keuangan sekolah.⁷⁹

Pada tahap selanjutnya dari pernyataan Guru MTs Negeri 01 Kepahiang tentang bagaimana dalam mengusahakan kekurangan dana yang dialami pihak sekolah?

Kepala Sekolah selalu berkonsultasi kepada ketua komite sekolah selaku pengurus komite untuk menanggulangi kebutuhan dari pihak sekolah dengan jalan kami mengundang para wali murid untuk mengadakan rapat wali murid untuk membahas kekurangan dana yang di butuhkan pihak sekolah yang menjadi kebutuhan prioritas sekolah demi kelancaran kegiatan para siswa dan menunjang prestasi siswa.⁸⁰

Adapun mengenai proses pencairan dana BOS, wawancara peneliti lakukan dengan Bendahara Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang. Diungkapkan bendahara Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang tentang kapan dan dimana proses pencairan dana BOS

⁷⁸ Romsy, Kepala MTsN 1 Kepahiang, tanggal 7 Februari 2019

⁷⁹ Ali Guru MTs Negeri 1Kepahiang, tanggal 20 Februari 2019

⁸⁰ Ali Guru MTsN 1 kepahiang, tanggal 20 Februari 2019

dilakukan? yaitu: Dana bantuan operasional sekolah ini dicairkan perbulan di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Adapun mengenai apakah sekolah memiliki catatan administrasi dana BOS?

Diungkapkan oleh bendahara Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang: Setiap dana yang kita terima kita catat dalam buku Kas, baik penerimaannya maupun penggunaannya, agar dana tersebut transparan. Jadi catatan ini tidak hanya dana BOS saja tetapi semua dana yang masuk ada pembukuannya.⁸¹

Sedangkan tentang alokasi dana BOS dan besaran jumlahnya,

diungkapkan oleh bendahara Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang : Besaran dana BOS di Mts Negeri 1 Kepahiang berjumlah 505.000.000,- Adapun dana BOS digunakan untuk pengembangan perpustakaan, Rp. 35.000.000, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru (PPDB), Rp. 7.000.000, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler Rp. 159.000.000, membayar kegiatan ulangan dan ujian Rp. 11.200.000, pembelian bahan-bahan habis pakai Rp. 190.000.000, rehab ruang kelas/perawatan madrasah, Rp. 15.000.000, pembayaran honorium bulanan guru bukan PNS dan honorium tenaga kependidikan, Rp. 82.800.000, pembelian perangkat komputer desktop/laptop, Rp. 5.000.000.⁸²

Dana operasional sekolah per bulan melalui bank serta tercantum di dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) untuk menjaga transparansi keuangan sekolah.

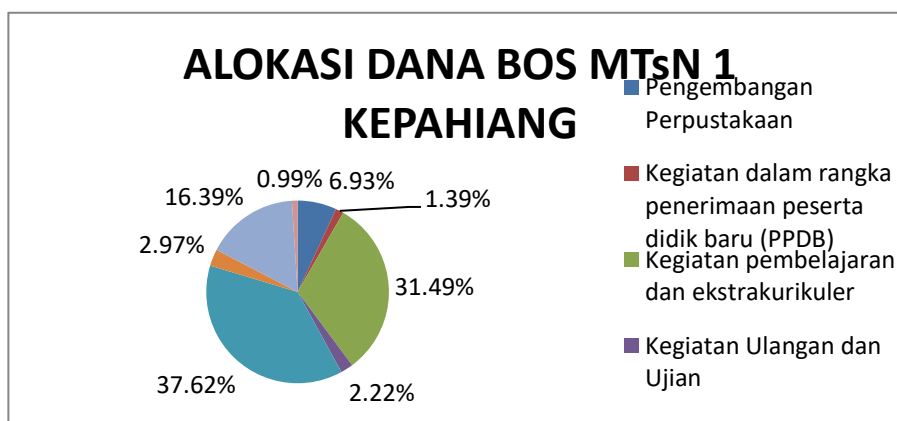
Dari pernyataan diatas jelaslah bahwa dalam proses jumlah dana yang didapat dan besarnya jumlah penggunaan pada aspek kegunaannya, tetapi disesuaikan dengan rencana anggaran yang telah disusun oleh pihak sekolah secara bersama-sama. Adapun anggaran dana tersebut diantaranya dipergunakan untuk biaya ujian, buku pelajaran,

⁸¹ Inyoduta, Bendahara MTsN 1 Kepahiang, tanggal 11 Februari 2019

⁸² Inyoduta, Bendahara MTsN 1 Kepahiang, tanggal 11 Februari 2019

peningkatan mutu guru, biaya perawatan ringan, honor guru, kegiatan kesiswaan dan lain-lain.

Adapun persentase alokasi dana bantuan operasional sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang yang digunakan untuk pengembangan perpustakaan (6.93%), kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru (PPDB) (1.39%), kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler (31.49%), membayar kegiatan ulangan dan ujian (2.22%), pembelian bahan-bahan habis pakai (37.62%), rehab ruang kelas/perawatan madrasah, (2.97%), pembayaran honorium bulanan guru bukan PNS dan honorium tenaga kependidikan, (16.40%), pembelian perangkat computer desktop/laptop, (0.99%).



2. Pelaporan penggunaan keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Pengelolaan keuangan sekolah harus terbuka sehingga dapat mengurangi potensi penyelewengan kebijakan serta praktik-praktik korupsi yang kerap menghantui sektor pendidikan. Keterbukaan terutama berkaitan dengan dana yang dipungut dari masyarakat, khususnya dari orang tua murid.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang tentang pihak yang berhak mengetahui pengeluaran keuangan yaitu: Setiap

pengeluaran yang dilakukan diketahui oleh kepala sekolah dan dewan guru agar terjadi transparansi keuangan. Dan yang berhak untuk mengetahui setiap pengeluaran keuangan yaitu kepala sekolah dan pengelola keuangan. Pengeluaran tersebut dicatat dalam pembukuan keuangan sekolah agar dapat dipertanggungjawabkan.⁸³

Berdasarkan hasil observasi penelitian diketahui bahwa setiap pengeluaran keuangan madrasah diketahui oleh kepala sekolah, dewan guru. Hal ini dilakukan untuk menjaga asas keterbukaan dan transparansi keuangan madrasah. Oleh karena itu kepala sekolah, bendahara, dewan guru dan komite sekolah pun harus mengetahui untuk apa dan berapa anggaran yang digunakan. Setiap pengeluaran yang dilakukan pihak madrasah dicatat dalam pembukuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan serta agar terpenuhinya tertib administrasi yang dilakukan oleh bendahara keuangan sekolah.

Hasil wawancara dengan kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang tentang pembukuan keuangan sekolah dan formatnya yaitu: Pembukuan keuangan sekolah dilakukan oleh bendahara sekolah. ini dilakukan untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran dana, di samping itu juga untuk tertib administrasi. Adapun format pembukuannya sesuai dengan petunjuk yang ada.⁸⁴

Ketika dilakukan wawancara kepada bendahara Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang tentang pencatatan dan bukti transaksi ditandatangani oleh kepala sekolah yaitu:

Setiap terjadinya penerimaan dan pengeluaran keuangan dicatat dalam buku kas umum kemudian buku kas tersebut disimpan pada lemari arsip. Setiap penerimaan dan pengeluaran diketahui dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan yang melakukan transaksi dalam hal ini bendahara.⁸⁵

Dari pengamatan di lapangan diketahui bahwa terdapat buku kas yang mencatat tentang alur penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pembukuan penggunaan

⁸³ Romsy, Kepala MTsN 1 Kepahiang, tanggal 7 Februari 2019

⁸⁴ Romsy, Kepala MTsN 1 Kepahiang, tanggal 7 Februari 2019

⁸⁵ Inyoduta, Bendahara MTsN 1 Kepahiang, tanggal 11 Februari 2019

anggaran ini dilakukan oleh bendahara sekolah dengan menggunakan format pembukuan sesuai dengan petunjuk yang memuat daftar dari setiap transaksi keuangan baik itu penerimaan dan pengeluaran secara tertib sesuai dengan tanggal penggunaan.

Pembukuan setiap transaksi yang berpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran uang wajib dicatat oleh bendaharawan dalam buku kas. Buku kas dapat berupa buku kas umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP). Buku kas umum merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang atau yang disamakan dengan uang.

Format pembukuan pun dilakukan oleh pihak sekolah sesuai dengan petunjuk pembukuan keuangan yang berisi tentang daftar semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran secara teratur dengan memuat tanggal transaksi dilakukan. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah (kwitansi). Semua transaksi dicatat sesuai urutan waktu (kronologis). Setiap halaman buku kas umum harus dilengkapi kepala surat/kop, kolom catatan, nomor halaman, dan nama bulan. Setiap sisi halaman harus diparaf oleh kepala sekolah dan bendahara komite sekolah. Pada akhir setiap bulan, buku kas umum ditutup dengan membandingkan saldo yang tercatat pada buku kas dan saldo di rekening bank.

Adapun mengenai kegiatan penutupan pembukuan yang dilakukan oleh pihak madrasah (bendahara sekolah) yaitu pada setiap akhir bulan, dengan diketahui oleh kepala sekolah dan bendahara. Di samping itu juga, buku laporan keuangan tersebut berhak juga diketahui oleh setiap warga sekolah. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya indikasi penyelewengan keuangan sekolah.

Dari hasil wawancara kepada bendahara Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kabupaten Kepahiang tentang penutupan pembukuan yaitu: Selaku bendahara, sudah menjadi tugas rutin kita untuk melakukan pencatatan keuangan. Pencatatan ini dilakukan di setiap

terjadinya transaksi keuangan. Pada akhir bulan, dilakukan penutupan pembukuan pada tanggal atau hari kerja di bulan itu, kemudian buku kas tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan sekolah.⁸⁶

Dari hasil pengamatan dan dokumentasi yang terdapat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang ditemukan buku kas yang merekap semua jalannya keuangan sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara selaku pihak yang mengelola keuangan sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembukuan keuangan telah dilakukan dengan baik, tertib dan sistematis, sehingga memudahkan bendahara dalam membuat laporan secara lengkap dan sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran.

Pengelolaan pembukuan keuangan dilakukan oleh bendahara sesuai dengan fungsinya. Karena itu dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan.

Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendahara, di samping mempunyai fungsi-fungsi

⁸⁶ Inyoduta, Bendahara MTsN 1 Kepahiang, tanggal 11 Februari 2019

bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pelaksanaan suatu pembayaran.

Dalam hal indikasi penyalahgunaan keuangan sekolah. Diungkapkan oleh kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang yaitu: Untuk indikasi penyalahgunaan keuangan sekolah tidak ada. Karena kita memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. Jika ada ditemukan indikasi tersebut kita akan memberikan teguran terhadap pelakunya.⁸⁷

Dari aspek pengeluaran anggaran diketahui oleh kepala sekolah dan bendahara, komite sekolah dan dewan guru yang lainnya. Pembukuan keuangan ini dilakukan di setiap terjadi transaksi. Penyampaian atau penutupan pembukuan anggaran dilakukan oleh bendahara sekolah dengan diketahui dan ditandatangani kepala sekolah serta bendahara. Penutupan pembukuan anggaran dilakukan oleh bendahara di akhir bulan berjalan.

3. Pertanggungjawaban keuangan

Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan, hal tersebut merupakan bentuk transparansi pihak sekolah dalam pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban keuangan tersebut harus tetap dijunjung tinggi.

Berbagai macam bentuk kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah, baik program kerja maupun penggunaan dana. Berkenaan dengan program kerja sekolah.

Hasil wawancara dengan kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang didapat informasi yaitu: Memang kita akui dari semua program yang kita rancang masih ada yang belum dapat dipenuhi pada saat ini, mudah-mudahan pada tahun berikutnya akan dapat dipenuhi. Di antara program yang belum dapat kita penuhi itu seperti sarana dan prasarana ibadah, ruang serba guna. Ini dikarenakan dana yang kita peroleh sangat terbatas dan harus mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan. Namun, kita mencoba

⁸⁷ Romsy, Kepala MTsN 1 Kepahiang, tanggal 7 Februari 2019

melibatkan masyarakat melalui komite sekolah guna menggalang bantuan dari orang tua siswa.⁸⁸

Dari hasil wawancara kepada kepala sekolah diketahui bahwa program kerja yang dilakukan masih ada yang belum terlaksana, hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang ada dan harus mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Namun demikian, diatasi oleh pihak sekolah dengan mengalihkan sebagian dana dengan tidak mengurangi dana yang lain melalui persetujuan dari komite sekolah dan dewan guru.

Pada sisi pertanggungjawaban keuangan madrasah, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang yaitu: Menjadi kewajiban kita untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap semua penggunaan keuangan sekolah. Laporan penggunaan keuangan ini kita buat dalam bentuk buku laporan dan juga sering kita sampaikan dalam rapat guru dan komite sekolah tetapi disampaikan secara global demi menjaga transparansi keuangan. Sedangkan untuk laporan kepada pihak pemerintahan dalam hal ini kementerian agama dan inspektorat kita sampaikan dalam bentuk buku laporan pengeluaran yang kita sampaikan tiap bulan, setiap semester dan di akhir tahun.⁸⁹

Dari pengamatan peneliti di Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang diketahui diberikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini disampaikan kepada pihak yang berwenang yaitu kementerian agama dan inspektorat jenderal secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan.

Adapun monitoring dan evaluasi diungkapkan oleh kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang yaitu: Monitoring dan evaluasi ini sering kita lakukan. Monitoring dan evaluasi yang kepala sekolah lakukan terhadap guru dan bendahara sekolah, seperti memonitor guru dalam pelaksanaan pembelajaran, bendahara dalam pengelolaan anggaran. Tetapi, kepala sekolah juga dimonitor dan dievaluasi oleh kementerian agama. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk bahan rujukan dalam penyusunan program di masa yang akan datang.⁹⁰

⁸⁸ Romsy, Kepala MTsN 1 Kepahiang, tanggal 7 Februari 2019

⁸⁹ Romsy, Kepala MTsN 1 Kepahiang, tanggal 7 Februari 2019

⁹⁰ Romsy, Kepala MTsN 1 Kepahiang, tanggal 7 Februari 2019

Dari hasil wawancara dengan guru MTs Negeri 01 kepahiang tentang apakah bapak tahu semua anggaran yang didapat di sekolah dan peruntukannya?

Semua keuangan yang ada di sekolah oleh kepala sekolah, selalu bersifat keterbukaan atau transparan penggunaannya dan dapat dilihat pertanggungjawabannya.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh atasan terhadap bawahan untuk mengetahui pelaksanaan program pendidikan. Kepala sekolah memonitoring dan mengevaluasi kerja guru dan bendahara. Monitoring dan evaluasi untuk bendahara seperti dalam masalah tertib administrasi, pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Pertanggungjawaban keuangan dilakukan dan disampaikan sesuai dengan sumber dana yang didapat oleh sekolah. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Pembahasan Penelitian

1. Proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijaksananya Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang telah melaksanakan program tersebut dalam menyusun RAPBS.

Penyusunan rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah pada madrasah yaitu pada identifikasi tujuan penyusunan dilakukan oleh Madrasah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kepahiang di akhir tahun anggaran. Namun pada proses penyusunan yang lain terdapat seperti skala prioritas yaitu proses belajar mengajar, dalam perencanaan terlebih dahulu menginventaris kebutuhan, menentukan program kerja yang akan dilaksanakan.

Dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) pihak sekolah baik Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang melaksanakannya sesuai dengan langkah-langkah penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah yaitu: inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pengembangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, analisis kebutuhan tahun berikutnya, dan masukan dari seluruh warga sekolah maupun Komite Sekolah; inventarisasi sumber pembiayaan baik dari rutin maupun pengembangan; penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) yang lengkap. Kemudian tentang proses program sekolah dalam upaya pengembangan sekolah.

Tujuan pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang dilakukan dengan komite sekolah. Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dengan melibatkan pihak lain seperti komite, dewan guru, dan orang tua. Hal ini bertujuan agar semua kebutuhan dapat terakomodir dengan baik.

Menurut Nanang Fattah : penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan pada tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan yang dibawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran.⁹¹

Menurut E. Mulyasa dalam penyusunan anggaran ini, terdapat empat fase kegiatan pokok antara lain; merencanakan anggaran; mempersiapkan anggaran; mengelola pelaksanaan anggaran; menilai pelaksanaan.⁹²

⁹¹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) h. 47

⁹² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 174

Proses penyusunan anggaran memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana anggaran. Di antara faktor yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran pendidikan di sekolah, seperti perkembangan peserta didik, pengembangan program, dan perbaikan serta peningkatan pendekatan belajar mengajar. Dalam menyusun RAPBS hendaknya melakukan langkah berikut untuk dipertimbangkan yaitu; menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah; menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya; menyelesaikan analisis kebutuhan; memprioritaskan kebutuhan; mengkonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan/dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah; mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan; menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan); dan mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi.

Untuk mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah yang sangat bertanggung jawab disini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi pembuatan administrasi dan mampu menerjemahkan program pendidikan ke dalam ekuivalensi keuangan dalam penyusunan anggaran.

Persoalan penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan dana secara tepat, sesuai dengan skala prioritas. Karenanya dibutuhkan tahapan-tahapan yang sistematis dalam penyusunan anggaran. Tahapan tersebut yaitu: mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran; mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang; semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang; memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang disetujui dan dipergunakan oleh

instansi tertentu; menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang; melakukan revisi usulan anggaran; persetujuan revisi usulan anggaran dan pengesahan anggaran.⁹³

Salah satu implikasi dari penerapan/pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan sistem pendidikan adalah diharuskannya pimpinan sekolah (terutama kepala sekolah) untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pengembangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Oleh karena itu disarankan agar pimpinan itu menyadari berbagai masalah yang harus mereka hadapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar itu. Berikut ini diuraikan beberapa masalah yang sering muncul dalam proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menganalisis alternatif pencapaian tujuan, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus diupayakan agar pendapatan tidak minus.

Berdasarkan hasil penelitian dari Esty Renaningtiyas menyatakan bahwa dalam pelaksanaan MBS di SMPN 1 Dagangan, banyak yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak sekolah. Pelaksanaan program dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi, penetapan visi dan misi analisa alternatif program, prioritas program, dan perumusan program kerja serta perumusan RAPBS. Dengan adanya sistem keterbukaan sekolah tidak berani main-main dalam pelaksanaan program MBS di waktu yang akan datang, kepala sekolah dalam melaksanakan program sangat bijak, transparan, dan guru sangat mendukung proses pertanggungjawaban sekolah. Peningkatan mutu pendidikan terutama tentang kelulusan, melalui program MBS ini berlandaskan asumsi bahwa sekolah akan meningkatkan mutu kelulusannya jika kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat diberi kewenangan yang cukup. Hal ini dapat

⁹³ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan*, h. 50

dilihat dari hasil prestasi akademis/non akademik yang pernah diraih oleh anak didik.⁹⁴

Dari penelitian diatas peneliti melihat banyak kesamaan yang dilakukan oleh MTs Negeri 01 Kepahiang dalam menerapkan program manajemen berbasis sekolah terutama dalam bidang penyusunan RAPBS dimana semua stakeholder disekolah dilibatkan kepala sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah semua bertanggungjawab dalam menyusun RAPBS sehingga program prioritas yang keterbukaan keuangan menjadi transparan dalam pelaksanaannya.

Jadi apa yang dilakukan oleh penelitian Esty Renaningtiyas di SMP 1 Dagangan, sama dengan apa yang peneliti lakukan di MTs Negeri 01 Kepahiang tapi perbedaan hanya tempat penelitiannya.

2. Pengelolaan yang dilakukan dalam penggunaan keuangan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengeluaran anggaran sesuai dengan RAPBS. Di antara penggunaan dana tersebut dimanfaatkan untuk peningkatan mutu sekolah. Setiap dana yang dibutuhkan dikeluarkan oleh bendahara atas permintaan kepala sekolah selaku pemegang wewenang perintah pembayaran.

Dari hasil penelitian juga, didapat informasi bahwa sekolah adakalanya mengalami kekurangan dana. Untuk mengatasi hal ini pihak madrasah mengambil langkah yaitu mengajukan usul revisi anggaran yang diajukan ke kementerian agama. Di samping itu juga, mengadakan rapat dewan komite sekolah dan orang tua siswa untuk membahas perihal minusnya dana yang didapat oleh sekolah untuk mencari suatu solusi

⁹⁴ Esty Renaningtiyas , “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMPN 1 Madiun”. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 1, Nomor 1 Januari 2013, 14-17 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615 14.*

yang terbaik untuk mengatasinya. Sementara itu, apabila terjadi kelebihan dana, maka akan dikembalikan ke kas negara sesuai dengan petunjuk yang berlaku.

Menurut E. Mulyasa dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah di disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).⁹⁵

Dalam melaksanakan kegiatan pembelanjaan keuangan harus tepat, efektif dan efisien. Penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, apakah itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat perlu didasarkan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan sebagai berikut: *pertama*, hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; *Kedua*, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan; *ketiga*, terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai bukti penggunaannya; *keempat*, sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan.

Dalam setiap melakukan penggunaan anggaran harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari penyimpangan penggunaan anggaran. Karena itu, setiap keuangan sekolah dipegang oleh bendahara. Bendahara yang berhak mengeluarkan dana tersebut apabila kepala sekolah mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran.

Berbagai sumber dana yang didapat dari pihak sekolah diantaranya dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dalam pemanfaatannya, melibatkan komite sekolah untuk

⁹⁵ E. Mulyasa *Manajemen Berbasis*, h. 176

mengawasi kegiatan pemanfaatan dan bantuan operasional sekolah (BOS). Besaran dana bantuan operasional sekolah tergantung dengan jumlah siswa sekolah. Adapun penggunaan dana pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang yaitu untuk pengembangan perpustakaan (6.93%), kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru (PPDB) (1.39%), kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler (31.49%), membayar kegiatan ulangan dan ujian (2.22%), pembelian bahan-bahan habis pakai (37.62%), rehab ruang kelas/perawatan madrasah (2.97%), pembayaran honorium bulanan guru bukan PNS dan honorium tenaga kependidikan (16.40%), pembelian perangkat computer desktop/laptop (0.99%).

3. Pelaporan penggunaan keuangan

Berdasarkan hasil penelitian jelas tampak bahwa madrasah menganut asas pemisahan tugas. Keuangan dipegang oleh bendahara dan setiap pengeluaran keuangan madrasah diketahui oleh kepala sekolah, dewan guru. Hal ini dilakukan untuk menjaga asas keterbukaan dan transparansi keuangan madrasah. Oleh karena itu kepala sekolah, bendahara, dewan guru dan komite pun mengetahui untuk apa dan berapa anggaran yang digunakan. Setiap pengeluaran yang dilakukan pihak madrasah dicatat dalam pembukuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi tertib administrasi yang dilakukan oleh bendahara keuangan sekolah.

Transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh bendaharawan sekolah senantiasa terjadi dari hari ke hari. Agar semuanya dapat lancar maka setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan hendaknya dicatat dan dibukukan secara tertib sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Untuk itu salah satu tugas dari bendahara sekolah adalah mengadakan pembukuan keuangan sekolah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, orang atau badan yang menerima, menyimpan, dan membawa

uang atau surat-surat berharga milik negara diwajibkan membuat catatan secara tertib dan teratur.

Pembukuan setiap transaksi yang berpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran uang wajib dicatat oleh bendaharawan dalam Buku Kas. Buku kas bisa berupa buku kas umum (BKU) dan buku kas pembantu (BKP). Buku kas umum (BKU) merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang atau yang sesuatu disamakan dengan uang.

Format pembukuan pun dilakukan oleh pihak sekolah sesuai dengan petunjuk pembukuan keuangan yang berisi tentang daftar semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran secara teratur dengan memuat tanggal transaksi dilakukan. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah (kuitansi). Semua transaksi dicatat sesuai urutan waktu (kronologis). Setiap halaman buku kas umum harus dilengkapi kepala surat/kop, kolom catatan, nomor halaman, dan nama bulan. Setiap sisi halaman harus diparaf oleh kepala sekolah dan bendahara komite sekolah. Pada akhir setiap bulan, buku kas umum ditutup dengan membandingkan saldo yang tercatat pada buku kas dan saldo di rekening bank.

Pengelolaan pembukuan keuangan dilakukan oleh bendahara sesuai dengan fungsinya. Karena itu dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan.

4. Pertanggungjawaban keuangan

Pada sisi pertanggungjawaban keuangan madrasah, dari hasil Penelitian yang dilakukan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang yaitu: sudah memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap semua penggunaan keuangan sekolah dengan baik. Laporan penggunaan keuangan di buat dalam bentuk buku laporan dan juga sering disampaikan dalam rapat guru dan komite sekolah tetapi disampaikan secara global demi menjaga transparansi keuangan. Sedangkan untuk laporan kepada pihak pemerintahan dalam hal ini kementerian agama dan inspektorat telah disampaikan dalam bentuk buku laporan pengeluaran tiap bulan, setiap semester dan di akhir tahun.

pertanggungjawaban keuangan dengan sasaran yang telah ditetapkan pada program. Apabila hasilnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, berarti program tersebut efektif. Jika sebaliknya, maka program tersebut dianggap tidak efektif (gagal). Melalui pertanggungjawaban keuangan akan dapat diketahui pula apa saja hambatan yang terjadi, dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Demikian pula, melalui evaluasi secara komprehensif akan dapat diketahui sejauhmana kemajuan atau hasil-hasil pendidikan dapat dicapai. Dalam implementasi manajemen keuangan evaluasi berkaitan dengan pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pertanggung jawaban penggunaan keuangan sekolah adalah sebuah laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Laporan dilakukan oleh

bendahara dan staf sekolah. Laporan keuangan berisikan tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan.⁹⁶

Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah.

Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Berbagai macam bentuk kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah, baik program kerja maupun penggunaan dana. Dari sisi program kerja yang dilakukan masih ada yang belum terlaksana, hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang ada dan harus mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Namun demikian, diatasi oleh pihak sekolah dengan mengalihkan sebagian dana dengan tidak mengurangi dana yang lain melalui persetujuan dari komite sekolah dan dewan.

Pada sisi pertanggung jawaban keuangan madrasah, diberikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini disampaikan kepada pihak yang berwenang yaitu kementerian agama dan inspektorat jenderal secara rutin. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru dan

⁹⁶ Nur komaria “ *Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan*”, jurnal Al- afkar Vol.IV, No.1, (April 2018). h. 90

bendahara. Dari kementerian agama monitoring dan evaluasi dilakukan kepada pihak sekolah baik kepala, bendahara maupun guru.

Dalam manajemen keuangan evaluasi dan pertanggungjawaban menjadi penting. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 kabupaten Kepahiang. Penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan keuangan Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang. Dalam pelaksanaannya penelitian ini masih banyak kekurangan khususnya pada aspek data yang diperoleh.

Sumber data yang diperoleh dari instrumen penelitian yang dirancang oleh peneliti, dokumentasi, wawancara dan observasi. Oleh karena itu, dalam proses pengolahannya pun membutuhkan waktu, agar dapat sempurna. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak terdapat berbagai macam kekurangan. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan peneliti baik keterbatasan waktu, ilmu, analisis, referensi serta materi. Dengan demikian, kondisi ini menjadikan penelitian ini belum begitu sempurna dalam menjawab rumusan masalah yang ada.

Keterbatasan lain yaitu penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang dari satu bulan, namun diharapkan mampu dirangkum secara umum.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya diketahui bahwa Tinjauan manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kabupaten. Telah melaksanakan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), walaupun program tersebut merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijaksananya Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang melaksanakan program tersebut dalam menyusun RAPBS.

Dapat dilihat dari proses identifikasi penyusunan RAPBS dilakukan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang di akhir tahun anggaran. Tujuan melibatkan pihak lain dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang agar semua kebutuhan dapat terakomodir. Prioritas pembiayaan secara umum terfokus pada peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar. Sedangkan pihak yang berhak untuk mengetahui setiap pengeluaran, pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang yaitu hanya kepala sekolah, komite sekolah dan guru. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan tentang manajemen keuangan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kabupaten Kepahiang pada permasalahan khusus dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yaitu pada sisi kapan identifikasi penyusunan RAPBS dilakukan. Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 dilakukan pada akhir tahun. Pada aspek lain seperti skala prioritas pada Kegiatan Belajar Mengajar, tujuan inventarisir kebutuhan yaitu untuk mencapai tujuan anggaran, program

- kerja ditetapkan agar rencana dapat berjalan dengan baik, dan pembahasan RAPBS dilakukan bersama-sama dengan komite, dewan guru, orang tua dan kepala sekolah dan dilakukan pada akhir tahun.
2. Pengelolaan yang dilakukan dalam penggunaan keuangan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Pengeluaran dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah. Pada upaya mengatasi kekurangan keuangan dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kabupaten Kepahiang mengajukan revisi anggaran ke Kementerian Agama disesuaikan dengan dana yang ada., di samping itu juga dibicarakan dengan komite sekolah agar mendapat solusi yang terbaik. Namun apabila keuangan tersebut berlebih maka madrasah mengembalikannya ke kas negara. Semua keuangan tersebut dipegang dan dikendalikan oleh bendahara selaku pemegang kuasa keuangan.
 3. Pelaporan penggunaan keuangan. Pada setiap pengeluaran yang dilakukan diketahui oleh kepala sekolah dan dewan guru, komite sekolah. Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 untuk menjaga transparansi keuangan dan menghindari penyelewengan dana. Bendahara selaku penanggung jawab keuangan selalu mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan. Format pembukuan pun dilakukan oleh pihak sekolah sesuai dengan petunjuk pembukuan keuangan yang berisi tentang daftar semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran secara teratur dengan memuat tanggal transaksi dilakukan. Penutupan pembukuan dilakukan oleh pihak madrasah pada setiap akhir bulan, dengan diketahui oleh kepala sekolah dan bendahara.
 4. Pertanggungjawaban keuangan. Berbagai macam bentuk kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah, baik program kerja maupun penggunaan dana. Hasil Penelitian diketahui bahwa program kerja yang dilakukan masih ada yang belum terlaksana, hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang ada dan harus mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh sekolah dibuat dalam bentuk laporan dan disampaikan setiap bulan kepada Kementerian agama, Inspektorat Jendral,

Orang tua dan komite sekolah. Dengan kata lain laporan disampaikan sesuai dengan sumber dana yang diterima madrasah.

B. Implikasi

Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien. Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan pengaturan yang baik. Keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan butuh uang. Keuangan juga perlu diatur sebaik-baiknya.

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Setiap perbedaan dan persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah menjalankan manajemen keuangan sebaik-baiknya. Implikasi dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi sekolah guna untuk meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan sekolah. Oleh karena itu, secara faktual implikasi tersebut diuraikan di bawah ini:

1. Manajemen keuangan memiliki peran penting dalam peningkatan mutu kegiatan sekolah, baik kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan pendidikan yang lainnya. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan pembinaan secara terus menerus guna untuk pengembangan ke arah yang lebih baik, efektif dan efisien.
2. Perlu diupayakan peran dan partisipasi masyarakat dalam membantu sekolah baik dalam bentuk pembiayaan maupun dalam bentuk yang lain seperti upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk kemajuan pendidikan..
3. Pihak sekolah perlu mengupayakan sumber pendapatan dari yang lain, seperti sumber biaya mandiri. Tidak hanya terpaku pada anggaran rutin sekolah dan dana BOS semata yang ketentuan dan jumlah besarnya sudah ditetapkan dan belum tentu mencukupi.

4. Perlu adanya pengawasan secara kontinu, baik pengawasan program maupun pengawasan pertanggungjawabann anggaran. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan efektivitas sekolah dapat berjalan dengan baik. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan begitu mutu kualitas pendidikan sekolah akan mengalami peningkatan terus menerus.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan manajemen keuangan sekolah pada periode-periode berikutnya.

1. Dalam merencanakan pembiayaan, perencanaan strategis harus terus dikembangkan, terutama dalam melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh lingkungan, baik internal maupun eksternal. Pada sisi lain, perlu digali potensi lain dari masyarakat dan orang tua siswa demi peningkatan mutu pendidikan disekolah melalui forum komite sekolah.
2. Kepala sekolah perlu dibekali dengan kemampuan manejerial yang baik agar mampu memberdayakan semua sumber sekolah baik sumber biaya maupun daya yang dimiliki oleh sekolah.
3. Produktivitas sekolah perlu ditingkatkan. Karena sekolah yang produktif memiliki dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas sekolah. Mendorong dan mengarahkan sumber daya sekolah pada etos kerja yang tinggi, etika kerja, disiplin dan profesional merupakan salah satu cara untuk menghasilkan sekolah yang produktif.
4. Pada bidang pertanggungjawaban perlu dioptimalkan agar kemungkinan penyimpangan atau efisiensi dalam pembiayaan dapat ditekan, sehingga akuntabilitas manajerial pembiayaan dapat terjamin, hal ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Surachmad, Winarno. 1995. *Metode Penelitian*, Bandung: Tarsito.
- Depdikbud. 1999. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendy, Ek. Mochtar. 1986. *Manajemen Suatu Pendekatan berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Costa, Vincent P. 2000. *Panduan Pelatihan untuk Mengembangkan Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Danim, Sudarwan. 2008. *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdiknas. 2002. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Buku 3 Panduan Monitoring dan Evaluasi*. Jakarta: Didasmen Direktorat SLTP Edisi 4.
- Depdiknas. 2001. *Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Sekolah Dasar*. Jakarta: Dikdasmen TK dan SD.
- Fattah, Nanang. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. 2009. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Hendarman, 2015, *Revolusi Kinerja Kepala Sekolah*, Jakarta: PT. Indeks.
- Hendarsjah, Hidajat. 2009. *Sudah Pantaskah Biaya Pendidikan Anak Anda? Cara Sederhana untuk Menalar Alokasi Pembiayaan di Bidang Pendidikan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- <http://inducation.blogspot.com/2009/8/20/manajeme-keuangan-sekolah.html>.
- <http://tikksuwantikno.wordpress.com/2009/08/20>.
- Mulyasa, E. 2013. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2005. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. Ke-5.
- Sagala, Syaiful. 2006. *Manajemen Strategi dalam peningkatan mutu pendidikan* . Bandung : Alfabeta.

Sudijono, Anas. 2006. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supriadi, Dedi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Bandung : Rosdakarya.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Masditou. Juli - Des 2017. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang bermutu.
Jurnal ANSIRU PAI Vol . 1 N o. 2.

Agustinus Hermino. 2017. *Manajemen Berbasis Sekolah di daerah 3T dan perbatasan di Indonesia*.
Bandung: Alfabeta.

Fahrurrozi. 2012. Manajemen Keuangan Madrasah, *Vol. XVII No. 2 . IAIN Walisongo*.

PP Nomor 48 tahun 2008 tentang *pendanaan pendidikan* Pasal 1 ayat 4.

<http://2009/8/20/manajemen-keuangan-sekolah.html>.

<http://inducation.blogspot.com/2008/10>.

Nur komaria. 2018. Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan, *jurnal Al- afkar Vol.IV, Nomor 1*.

Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, Surakarta.

Ramayulis dan Mulyadi. 2017. *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Jakarta:Kalam Mulia.

Budi.2011. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar yang Efektif*, (Studi Multi Kasus Sekolah Dasar Panglima Sudirman, Sekolah Dasar Abdul Rahman, dan Sekolah Dasar Welirang di Kota Batu). Disertasi, Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

- Andrian, Arkanudin, Gusti Suryansyah. 2013. Implementasi Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Kab Sintang”, *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*.
- Hasbi, 2013. Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional di kota Palopo Tahun 2011-2012 , *Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3*.
- Sabar Budi Harjo. 2012. Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia , *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Nomor 2*.
- Marus Suti. 2011. Strategi peningkatan mutu di era otonomi pendidikan . *Jurnal Medtek, volume 3, Nomor 2*.
- Sri Suratno. 2005. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Studi Kasus di SD Islam Unggulan Bazra Sragen*. Tesis, STAIN Surakarta.
- Ichsani. 2008. *Transparansi Manajemen Keuangan, Studi di Pondok Pesantren Salaf dan Modern Masyithoh di Desa Bolo, Wonosegoro, Boyolali*, Tesis, STAIN Surakarta.
- Adre. 2005. Analisis Kebijakan Berbasis Sekolah. *Jurnal Pendidikan jilid 14, Nomor 2*.
- Ba’haqi, Nazir, Zahra. 2012. Manajemen Pembiayaan pendidikan pada SMKN di Kab. Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan Program Pasca Sarjana Syiah Kuala, Volume 1, Nomor 1*.
- Wagiran. 2006. Peluang dan tantangan pembiayaan pendidikan menengah kejuruan dalam era otonomi daerah dan penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Volume 15, Nomor 2*.
- David Wijaya. 2009. Implikasi Manajemen keuangan Sekolah terhadap kualitas pendidikan. *Jurnal Pendidikan Penabur, Nomor 13*.

Muhibbah.2008. *Aplikasi Manajemen Keuangan di Pondok Pesantren Madinnatunajah* .Jombang.

Esty Renaningtyas .2013. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMPN 1 Madiun. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 1, Nomor 1*.

Dewi Arianti.2014. *Penerapan Manajemen Keuangan di Man Insan Cendekia Serpong*

BIODATA DIRI



Wanhar dilahirkan pada tanggal 10 April 1976 di desa Muara Lintang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Anak ke 6 dari 6 Saudara ayah bernama H. Sopian Suri dan ibu bernama

HJ. Hamida.

Pendidikan ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 35 Pendopo dan dilanjutkan ke madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya Palembang, melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas yaitu SMK GIZI di Bengkulu dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi ke STAIN (IAIN) Bengkulu pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Bahasa Arab serta melanjutkan pendidikan S2 di Pascasarjana IAIN Curup Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Adapun riwayat pekerjaan pada tahun 2003 mengajar di SMA Muhammadiyah Kepahiang sudah mengajar di MTs Negeri 02 Kepahiang sampai tahun 2013 setelah itu mengajar di MIS 04 Embong Ijuk sekaligus di tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah lalu pada tahun 2015 ditugaskan mengajar dan diberi tugas tambahan menjadi Kepala Madrasah di MTs Negeri 03 Kepahiang di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang.

WAWANCARA PENELITIAN

TEMA “ TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM KERANGKA MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 01 KEPAHIANG

RESPONDEN : Kepala Madrasah MTs Negeri 01 Kepahiang

TEMPAT : Madrasah MTs Negeri 01 Kepahiang

TANGGAL : 07 Februari 2019

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana tentang proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)?

No	Penelitian/ Subjek Penelitian	Pertanyaan / Jawaban
1	Peneliti	Apakah dan mengapa serta siapa yang melaksanakan proses mengidentifikasi tujuan penyusunan anggaran?
	Subjek Penelitian	Pihak sekolah sebelum menyusun rencana penggunaan keuangan terlebih dahulu kita mengidentifikasi tujuan penyusunan terlebih dahulu. Karena tanpa identifikasi rencana penyusunan maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Identifikasi penyusunan tujuan ini kita lakukan pada akhir tahun anggaran bersama kepala sekolah dan staf.
2	Peneliti	Apakah dalam penyusunan RAPBS ditentukan skala prioritasnya?
	Subjek Penelitian	Tentu. Skala prioritas kita yaitu pada aspek pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
3	Peneliti	Sebelum menyusun anggaran, apakah terlebih dahulu pihak sekolah menginventarisir rencana yang akan dilaksanakan ? dan mengapa
	Subjek Penelitian	Semua kebutuhan yang kita perlukan perlu kita inventaris terlebih dahulu. Hal ini sangat penting dalam membantu kita menyusun rencana kegiatan sekolah untuk tahun yang akan dijalani yang dituangkan dalam bentuk program kerja sekolah. Disamping itu juga sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi program yang kita lakukan pada tahun yang lewat. Proses inventarisir ini tentunya disekolah pada akhir tahun ajaran.
4	Peneliti	Apakah pihak sekolah menentukan program kerja? Mengapa dan siapa dan bagaimana proses pembuatan program kerja itu dilakukan?
	Subjek Penelitian	Ya. Sekolah menentukan program kerja agar rencana anggaran dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan program ini

		dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan cara melakukan musyawarah kerja dengan staf (guru dan tata usaha)
5	Peneliti	Apakah RAPBS dibahas bersama guru dan komite sekolah? Kapan dan dimana penyusunan RAPBS dilakukan
	Subjek Penelitian	Ya. RAPBS dilakukan oleh kepala sekolah bersama guru dengan mengundang komite sekolah. RABS ini kita susun di sekolah yang dilakukan pada awal tahun anggaran. RAPBS yang dibuat juga untuk satu tahun yaitu pada bulan Januari hingga Desember. Adapun tujuannya yaitu agar terjadi ketransparanan anggaran.

2. Bagaimana tentang pengelolaan yang dilakukan dalam penggunaan keuangan sekolah?

No	Penelitian/ Subjek Penelitian	Pertanyaan / Jawaban
1	Peneliti	Usaha apa yang dilakukan sekolah dalam penggunaan anggaran?
	Subjek Penelitian	Penggunaan anggaran kegiatan madrasah mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan
2	Peneliti	Apakah penggunaan pembiayaan diarahkan pada peningkatan mutu sekolah? Siapa yang mengeluarkannya?
	Subjek Penelitian	Pengeluaran anggaran pembiayaan / dana dilakukan oleh bendahara atas permintaan kepala sekolah tentunya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan yang tercantum dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam upaya peningkatan dan belanja sekolah dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran.
3	Peneliti	Usaha apa yang dilakukan pihak sekolah, apabila anggaran yang diperoleh kurang dari rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS)? Siapa dan dimana usaha mencari kekurangan dana tersebut?
	Subjek Penelitian	Kalau dalam pelaksanaannya kita mengalami kekurangan dana, maka dari Kepala Sekolah mengajukan revisi anggaran (untuk dana rutin) terus disesuaikan dengan dana yang ada (dana BOS). Pengajuan tersebut dilakukan oleh Kepala Sekolah ke Kementerian Agama Provinsi. Begitupun kalau dana kita peroleh berlebih maka akan dikembalikan oleh bendahara ke kas Negara
4	Peneliti	Apakah penggunaan dana harus memperhatikan perangkat peraturan yang ada dan selaras dengan rincian pengeluaran?

		Mengapa dan siapa yang perlu memperhatikan perangkat peraturan yang ada dan selaras dengan rincian pengeluaran?
	Subjek Penelitian	Ya. Penggunaan dana harus memperhatikan perangkat peraturan yang ada dan selaras dengan rincian pengeluaran. Bendahara selaku pengelola keuangan harus memperhatikan hal ini agar supaya tidak terjadi penyimpangan anggaran sekolah
5	Peneliti	Apakah pemanfaatan dana BOS dibicarakan dengan komite sekolah? Dan mengapa dan apa fungsi komite sekolah dalam pemanfaatan dana BOS?
	Subjek Penelitian	Dalam hal dana BOS yang kita terima kita bicarakan dengan komite sekolah, begitupun dengan orang tua siswa. Ini kita lakukan agar komite tahu kemana dan untuk apa dana digunakan. Sehingga komite dapat memantau kegiatan pemanfaatan dana BOS ini.

3. Bagaimana tentang mekanisme pelaporan penggunaan keuangan sekolah?

No	Penelitian/ Subjek Penelitian	Pertanyaan / Jawaban
1	Peneliti	Apakah setiap pengeluaran dana diketahui oleh Kepala Sekolah dan dewan guru? Mengapa dan siapa saja yang berhak mengetahui pengeluaran dana?
	Subjek Penelitian	Setiap pengeluaran yang dilakukan diketahui oleh Kepala Sekolah dan dewan guru agar terjadi transparansi keuangan. Dan yang berhak untuk mengetahui setiap pengeluaran keuangan yaitu kepala sekolah dan pengelola keuangan. Pengeluaran tersebut dicatat dalam pembukuan keuangan sekolah agar dapat dipertanggungjawabkan.
2	Peneliti	Apakah ada pembukuan dalam mengelola dana? Mengapa dan siapa yang melakukan pembukuan serta bagaimana formatnya
	Subjek Penelitian	Pembukuan keuangan sekolah dilakukan oleh bendahara sekolah. Ini dilakukan untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran dana, disamping itu juga untuk tertib administrasi. Adapun format pembukuannya sesuai dengan petunjuk yang ada.
3	Peneliti	Apakah dan bagaimana reaksi sekolah jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran?
	Subjek Penelitian	Untuk indikasi penyalahgunaan keuangan sekolah tidak ada. Karena kita memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. Jika ada ditemukan indikasi tersebut kita akan memberikan teguran terhadap pelakunya.

4. Bagaimanakah tentang pertanggungjawaban keuangan sekolah?

No	Penelitian/ Subjek Penelitian	Pertanyaan / Jawaban
1	Peneliti	Apakah ada dan diapa penanggungjawab program kegiatan?
	Subjek Penelitian	Kepala Sekolah merupakan penanggung jawab program kegiatan sekolah. Perlu adanya penanggungjawab program ini agar semua program dapat dijalankan sesuai dengan rencana.
2	Peneliti	Siapa dan apakah semua warga sekolah pelaksananya?
	Subjek Penelitian	Semua warga sekolah ini baik Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah ikut serta dalam melaksanakan program dengan tugas-tugasnya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih kerja.
3	Peneliti	Apakah terdapat peran yang jelas antar masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kegiatan?
	Subjek Penelitian	Ya, setiap pihak memiliki program kegiatan masing-masing.
4	Peneliti	Apakah Kepala Sekolah melakukan pemantauan secara terus menerus?
	Subjek Penelitian	Pengawasan kita lakukan dengan tujuan mengetahui sejauh mana program kerja yang disusun ini telah mampu dikerjakan.
5	Peneliti	Mengapa perlu adanya pemantauan dan bagaimana pemantauan dilakukan?
	Subjek Penelitian	Perlunya pemantauan agar mengetahui apa yang telah dilakukan sekolah terhadap rencana yang telah dirancang. Pengawasan ini kita lakukan secara rutin setiap bulan.
6	Peneliti	Apakah teridentifikasi program kegiatan apa saja yang belum terlaksana? Mengapa?
	Subjek Penelitian	Memang kita akui dari semua program yang kita rancang masih ada yang belum dapat dipenuhi pada saat ini, mudah-mudahan pada tahun berikutnya akan dapat dipenuhi. Diantara program yang belum dapat kita penuhi itu seperti sarana dan prasarana ibadah, ruang serba guna. Ini dikarenakan dana yang kita peroleh sangat terbatas dan harus mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan. Namun, kita mencoba melibatkan masyarakat melalui komite sekolah guna menggali bantuan dari orang tua siswa
7	Peneliti	Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi tersebut?
	Subjek Penelitian	Dengan rapat sekolah
8	Peneliti	Apakah peruntukan dana diklarifikasi secara jelas? Mengapa?

	Subjek Penelitian	Ya, agar sesuai dengan prosedur dan rencana yang telah disusun.
9	Peneliti	Apakah pihak sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah? Kepada siapa laporan disampaikan?
	Subjek Penelitian	Menjadi kewajiban kita untuk memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap semua penggunaan keuangan sekolah. Laporan penggunaan keuangan ini dibuat dalam bentuk buku laporan dan juga sering kita sampaikan dalam rapat guru dan komite sekolah tetapi disampaikan secara global semi menjaga transparansi keuangan. Sedangkan untuk laporan kepada pihak pemerintahan dalam hal ini kementerian agama dan inspektorat kita sampaikan dalam bentuk buku laporan pengeluaran yang kita sampaikan tiap bulan, setiap semester dan diakhir tahun.
10	Peneliti	Apakah monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan? Mengapa dan bagaimana pelaksanaannya?
	Subjek Penelitian	Monitoring dan evaluasi ini sering kita lakukan. Monitoring dan evaluasi yang Kepala sekolah lakukan terhadap guru dan bendahara sekolah, seperti memonitor guru dalam pelaksanaan pembelajaran, bendahara dalam pengelolaan anggaran. Tetapi, Kepala Sekolah juga dimonitor dan dievaluasi oleh kementerian agama. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk bahan rujukan dalam penyusunan program dimasa yang akan datang.

WAWANCARA PENELITIAN

TEMA “ TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM KERANGKA MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI MADRASAH TSANAWIYAH 01 NEGERI KEPAHANG

RESPONDEN : Bendahara Madrasah MTs Negeri 01 Kepahiang
 TEMPAT : Madrasah MTs Negeri 01 Kepahiang
 TANGGAL : 11 Februari 2019
 PERMASALAHAN :

Bagaimana tentang mekanisme pelaporan penggunaan keuangan?

No	Penelitian/ Subjek Penelitian	Pertanyaan / Jawaban
1	Peneliti	Apakah Pencatatan dan bukti transaksi ditandatangani oleh kepala sekolah
	Subjek Penelitian	Ya Setiap terjadinya penerimaan dan pengeluaran keuangan dicatat dalam buku kas umum kemudian buku kas tersebut disimpan pada lemari arsip. Setiap penerimaan dan pengeluaran diketahui dan ditandatangani kepala sekolah dan yang melakukan transaksi dalam hal ini bendahara
2	Peneliti	Kapan waktu Penutupan Pembukuan? dan ditandatangani oleh siapa saja
	Subjek Penelitian	Selaku bendahara, sudah menjadi tugas rutin kita untuk melakukan pencatatan keuangan. Pencatatan ini dilakukan di setiap terjadinya transaksi keuangan. Pada akhir bulan, dilakukan penutupan pembukuan pada tanggal atau hari kerja di bulan itu, kemudian buku kas tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan sekolah.

WAWANCARA PENELITIAN

TEMA “ TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM KERANGKA MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI MADRASAH TSANAWIYAH 01 NEGERI KEPAHIANG

RESPONDEN : Bendahara Madrasah MTs Negeri 01 Kepahiang

TEMPAT : Madrasah MTs Negeri 01 Kepahiang

TANGGAL : 11 Februari 2019

PERMASALAHAN :

Bagaimana tentang pengelolaan yang dilakukan dalam penggunaan keuangan?

No	Penelitian/ Subjek Penelitian	Pertanyaan / Jawaban
1	Peneliti	Siapa pemegang keuangan sekolah
	Subjek Penelitian	di sekolah kita semua keuangan dikendalikan oleh bendahara baik uang masuk maupun uang keluar. Uang yang dipegang tersebut dimasukkan ke dalam rekening sekolah, dan dikeluarkan apabila ada perintah kepala sekolah.
2	Peneliti	Kapan dan dimana proses pencairan dana BOS dilakukan ?
	Subjek Penelitian	Dana bantuan operasional sekolah ini dicairkan perbulan di Bank Rakyat Indonesia (BRI).
3	Peneliti	Apakah sekolah memiliki catatan administrasi dana BOS ?
		Setiap dana yang kita terima kita catat dalam buku Kas, baik penerimaannya maupun penggunaannya, agar dana tersebut transparan. Jadi catatan ini tidak hanya dana BOS saja tetapi semua dana yang masuk ada pembukuannya.
4	Peneliti	Berapa alokasi dana BOS dan besaran jumlahnya
		Besaran dana BOS di Mts Negeri 1 Kepahiang berjumlah 505.000.000,- Adapun dana BOS digunakan untuk pengembangan perpustakaan, Rp. 35.000.000, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru (PPDB), Rp. 7.000.000, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler Rp. 159.000.000, membayar kegiatan ulangan dan ujian Rp. 11.200.000, pembelian bahan-bahan habis pakai Rp. 190.000.000, rehab ruang kelas/perawatan madrasah, Rp. 15.000.000, pembayaran honorium bulanan guru bukan PNS dan honorium tenaga kependidikan, Rp. 82.800.000, pembelian perangkat komputer desktop/laptop, Rp. 5.000.000.

WAWANCARA PENELITIAN

TEMA “ TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM KERANGKA MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI MADRASAH TSANAWIYAH 01 NEGERI KEPAHIANG

RESPONDEN : Guru (wakil kepala sekolah bagian Kesiswaan).
 TEMPAT : Madrasah MTs Negeri 01 Kepahiang
 TANGGAL : 18 Februari 2019
 PERMASALAHAN :

Bagaimana tentang proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)?

No	Penelitian/ Subjek Penelitian	Pertanyaan / Jawaban
1	Peneliti	Apakah Bapak ikut serta dalam melaksanakan proses penyusunan RAPBS?
	Subjek Penelitian	Ya dalam penyusunan RAPBS kami diajak dan diikutsertakan dalam pelaksanaan tersebut dimana pelaksanaan rapat dilakukan pada akhir tahun dan sebelumnya kami menginventarisir kebutuhan yang menjadi prioritas terutama dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
2	Peneliti	Selain dari kegiatan KBM kegiatan apa saja yang dapat diusulkan oleh para dewan guru dalam RAPBS?
	Subjek Penelitian	Banyak kegiatan yang lain dapat kami usulkan seperti kegiatan ekstra kurikuler demi menunjang prestasi anak.
3	Peneliti	Apakah bapak tahu semua anggaran yang didapat di sekolah dan peruntukannya?
	Subjek Penelitian	Semua keuangan yang ada di sekolah oleh kepala sekolah, selalu bersifat keterbukaan atau transparan penggunaannya dan dapat dilihat pertanggungjawabannya.

WAWANCARA PENELITIAN

TEMA “ TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM KERANGKA MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI MADRASAH TSANAWIYAH 01 NEGERI KEPAHIANG

RESPONDEN : Guru MTs Negeri 01 Kepahiang
 TEMPAT : Madrasah MTs Negeri 01 Kepahiang
 TANGGAL : 20 Februari 2019
 PERMASALAHAN :

Bagaimana tentang proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)?

No	Penelitian/ Subjek Penelitian	Pertanyaan / Jawaban
1	Peneliti	Apakah bapak selaku ketua komite sekolah diajak dalam melaksanakan proses penyusunan RAPBS?
	Subjek Penelitian	Ya dalam penyusunan RAPBS Pengurus komite Sekolah dikutsertakan dan diundang dalam pelaksanaan tersebut dimana sebelum pelaksanaan rapat dilakukan pada akhir tahun pengurus Komite Sekolah dilibatkan untuk menginventarisir kebutuhan yang menjadi prioritas terutama dalam kebutuhan sekolah serta skala prioritas yang dibutuhkan oleh pihak sekolah .
2	Peneliti	Bagaimana bapak melihat pengelolaan keuangan yang ada di sekolah?
	Subjek Penelitian	Kami melihat bahwa pengelolaan keuangan yang ada di sekolah sudah cukup baik dan transparan dalam pelaksanaannya baik dari segi penggunaannya maupun laporan keuangan yang mana pengurus komite sekolah diberi laporan penggunaan keuangan sekolah.
3	Peneliti	Bagaimana bapak selaku ketua komite dalam mengusahakan kekurangan dana yang dialami pihak sekolah
	Subjek Penelitian	Kepala Sekolah selalu berkonsultasi kepada ketua komite sekolah selaku pengurus komite untuk menanggulangi kebutuhan dari pihak sekolah dengan jalan kami mengundang para wali murid untuk mengadakan rapat wali murid untuk membahas kekurangan dana yang di butuhkan pihak sekolah yang menjadi kebutuhan prioritas sekolah demi kelancaran kegiatan para siswa dan menunjang prestasi siswa.

Photo Sekolah MTs Negeri 01 Kepahiang



Ruang Guru di MTs Negeri 01 Kepahiang



Ruang Kelas dan taman di depan kelas

Photo Penghargaan dari KPPN Curup



Penghargaan dari KPPN curup atas prestasi dalam pengelolaan keuangan terbaik
MTs Negeri 01 Kepahiang

**Photo Wawancara dengan Kepala Madrasah
MTs Negeri 01 Kepahiang**



Wawancara dengan Kepala MTs Negeri 01 Kepahiang

Photo Piala Prestasi Anak MTs Negeri 01 Kepahiang



Poto Piala prestasi yang didapat dari siswa siswi

Photo Prestasi dibidang Pramuka



Juara umum Pramuka Bupati Rejang Lebong dan Juara Umum pramuka Se Sumbagsel

Photo wawancara Dengan Bendahara



Photo wawancara dengan Bendahara MTs Negeri 01 Kepahiang

Photo Kegiatan Siswa Siswi MTs Negeri 01 Kepahiang



Photo Kegiatan Ektra Kurikuler

Photo Wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah



Photo wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah
Bidang Kesiswaan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Jl. Dr. A.K. Gani No. 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 54/In.34/PP.00.9/06/2018**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama RI,
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Satuan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Saudara:
- Pertama** : 1. **Dr. H. Lukman Asha, M. Pd. I** NIP 195909291992031001
2. **Dr. Kusen, S. Ag., M. Pd** NIP 196906201998031002

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Wanhar
NIM : 17861018
JUDUL TESIS : Studi Komparatif Manajemen Keuangan dalam Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kabupaten Kepahiang

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan minimal 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas memwibimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 16 Mei 2018
a.n. Rektor IAIN Curup
Wakil Rektor I,


Hendra Harmi

- Tembusan**
1. Pembimbing I dan II,
 2. Bendahara IAIN Curup,
 3. Kasubbag AAK,
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup,
 5. Mahasiswa yang bersangkutan;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.staincurup.ac.id

Nomor : 182/In.34/PPS/PP.00.9/10/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kepahiang

di- Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Wanhar
NIM : 17861018
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Judul Tesis : **Studi Komparatif Manajemen Keuangan dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabupaten Kepahiang**
Waktu Penelitian : **29 Oktober 2018 s.d 29 April 2019**
Tempat Penelitian : MTs Negeri 01 dan MTs Negeri 02 Kepahiang

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Curup, 29 Oktober 2018
Direktur,

M. Ifnaldi M. Pd
NIP. 196506272000031002



Tembusan
1. Ptl. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup.
2. Mahasiswa Ybs.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Telp (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN PENELITIAN

NOMOR :579/91/I-Pen/X/DPMPTSP/2018

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 182/In.34/PPS/PP.00.9/10/2018 Tanggal : 29 Oktober 2018

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama	: WANHAR
NPM	: 17861018
Pekerjaan	: PNS
Lokasi Penelitian	: MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KABUPATEN KEPAHIANG
Waktu Penelitian	: 2018-10-29 s.d 2019-04-29
Tujuan	: MELAKUKAN PENELITIAN
Judul Proposal	: Studi Komparatif Manajemen Keuangan Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabupaten Kepahiang
Penanggung Jawab	: DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN CURUP
Catatan	: 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan Penelitian 2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang. 4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Kepahiang, 02 November 2018
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



M. SALIHIN, M.Si
 Pembina TK.1
 NIP. 19711216 200003 1 003

Disampaikan Kepada Yth :
 Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
 Kepala Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
 Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
 Kepahiang
 Camat Kepahiang

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Hanafiah
NIP : 197607282007101003
Jabatan : Wakil Kepala bidang Kesiswaan MTs Negeri 01 Kepahiang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wanhar, S.Pd.I
NIM : 17861018
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Benar telah melaksanakan wawancara kepada saya di MTs Negeri 01 Kepahiang, guna penyelesaian penelitian tesis yang bersangkutan.

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, Maret 2019

Waka Kesiswaan



Ali Hanafiah, S.Ag

NIP.197607282007101003



KEMENTERIAN AGAMA RI
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NEGERI 01 KEPAHIANG
Jalan Raya Durian Depun Kecamatan Merigi

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-196/Mts.07.12/PP.005/03/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Romsy, S.Pd.,MM
NIP : 196805201997031004
Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wanhar, S.Pd.I
NIM : 17861018
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Telah benar-benar melaksanakan Penelitian Mulai dari tanggal September 2018 sampai dengan Maret 2019 di Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang.

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 13 Maret 2019
Kepala Madrasah
Romsy, S.Pd.,MM
196805201997031004